

**PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM BIDANG KEAGAMAAN
DI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

ERLI LIANA RAMADANI
NIM. 1717103012

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAAN

Nama : Erli Liana Ramadani
NIM : 1717103012
Jenjang : S-1
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri dengan pengecualian pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apalagi dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka, saya berhak menerima saksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang peroleh.

Purwokerto, 16 April 2024

Peneliti,



Erli Liana Ramadani
NIM. 1717103012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BIDANG KEAGAMAAN DI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Erli Liana Ramadani, NIM. 1717103012, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** oleh sidang dewan pengujian skripsi.

Ketua Sidang/ pembimbing

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muridan, M.Ag

NIP. 19740718 200501 1 006

Ulul Aedi, M.Ag

NIP. 19870507 202012 1 006

Penguji Utama

Dr. Nawawi, M.Hum.

NIP. 19710508 199803 1 003

Mengesahkan
Purwokerto, jum'at, 19-04-2024
Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag

NIP. 19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret..... 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Erli Liana Ramadani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Erli Liana Ramadani
NIM : 1717103012
Jurusan : Manajemen Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah
Judul : **Manajemen Sumber Daya Perempuan Dalam Bidang Keagamaan Di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


M. A. M. Ay
NIP. 19740718 200501 1 006

MOTTO

Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan

KH. Abdurahman Wahid



PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BIDANG KEAGAMAAN DI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PURBALINGGA

Erli Liana Ramadani
NIM. 1717103012

ABSTRAK

Manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam konteks partai politik memiliki peran yang krusial, terutama dalam bidang keagamaan di masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga sebagai salah satu entitas politik yang berbasis keagamaan memegang peran penting dalam memajukan agenda keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik manajemen SDM perempuan di PKB Purbalingga dalam bidang keagamaan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis berupa keterangan, penjelasan dan informasi lisan. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB Purbalingga memiliki badan otonom perempuan bangsa yang mendukung kegiatan keagamaan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan keagamaan seperti PHBI, santunan anak yatim, bakti sosial, dan Masura (Majelis Ulama Rakyat) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat basis keagamaan partai. Faktor-faktor pendukung manajemen sumber daya perempuan meliputi komitmen partai, dukungan organisasi, dan partisipasi aktif perempuan. Namun, terdapat juga beberapa faktor penghambat seperti stereotip gender dan minimnya kesempatan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya seperti pelaksanaan pelatihan khusus dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan peran perempuan dalam bidang keagamaan serta memberikan masukan bagi pengembangan manajemen sumber daya perempuan di PKB Purbalingga dan partai politik lainnya.

Kata kunci: *Manajemen Sumber Daya Manusia, Partisipasi Perempuan, Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga, dan Keagamaan*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah, inayahnya serta nikmat sehat dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah dengan hati yang bahagia, karya kecil ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Aenur Rofik dan Ibu Barinah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingan yang tak terhingga. Mereka telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan cahaya dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Doa, nasihat, dan semangat yang selalu mereka berikan telah menjadi pendorong utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta dan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, semoga semakin maju dan sukses.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap bahwa karya ini dapat menjadi bentuk amal shalih yang bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, serta semua pihak yang terlibat dalam perjalanan penulisan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dan menjadikan karya ini sebagai jalan menuju keberkahan bagi semua yang terlibat. Aamiin ya Robbal Alamin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan semua yang setia kepada ajaran-Nya hingga akhir zaman.


Skripsi ini berjudul "Manajemen Sumber Daya Perempuan Dalam Bidang Keagamaan Di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga" merupakan hasil dari perjuangan dan dedikasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, baik dalam hal moral maupun materi. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan wakil rektor I, II, dan III atas kesempatan untuk mengejar ilmu di universitas ini.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
4. Ulul Aedi, M. Ag., selaku Koordinator Prodi Manajemen Dakwah.
5. Muridan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap pengurus dan staff Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga yang telah memberikan informasi dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. Bapak Aenur Rofik, Alm. Bapak Imam Ahmadi, Ibu Barinah, dan Ibu Istiqomah yang telah mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Nurul Hikmatul Aziz, suami tercinta yang selalu menemani dan mensupport penulis.
10. Segenap teman dan sahabat (Endah, Renata, Rias, Nanda, Fieka) yang selalu mensupport dan mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 16 April 2024



Erli Liana Ramadani
NIM. 1717103012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Partisipasi Perempuan.....	17
B. Manajemen Sumber Daya Manusia	20
C. Partai Politik	25
D. Kegiatan Keagamaan	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Penentuan Informan	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran umum Tentang DPC PKB Purbalingga.....	47
B.	Manajemen Sumber Daya Manusia PKB Purbalingga.....	58
C.	Partisiapasi Perempuan Dalam Bidang Keagamaan Di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga.....	64
D.	Peran Perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemberdayaan Keagamaan	83
E.	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Sumber Daya Perempuan di PKB Purbalingga	85
F.	Upaya Mengatasi Hambatan dan Tantangan	86
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menitikberatkan pada kedaulatan rakyat, di mana keputusan-keputusan penting diambil secara bersama-sama oleh rakyat, yang pada intinya menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dianut Indonesia berakar pada Pancasila, yang mencakup nilai-nilai keadilan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa. Walau demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 belum mengalami amandemen, beberapa nilai utama dari demokrasi konstitusional juga dapat ditemukan di dalamnya. Misalnya, negara Indonesia ditegaskan sebagai negara yang didasarkan pada hukum (Rechtsstaat), bukan hanya pada kekuasaan semata. Sistem pemerintahan juga ditekankan berdasarkan konstitusi, bukan berbentuk absolut atau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerminkan corak khas demokrasi Indonesia. Ini menandakan bahwa negara Indonesia mengutamakan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan, sambil mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan kebijaksanaan bersama dalam mencapai konsensus yang adil. Dengan demikian, demokrasi Indonesia memadukan prinsip-prinsip Pancasila dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional, menciptakan kerangka kerja yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, keadilan, dan supremasi hukum.¹

Prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum merupakan salah satu karakteristik utama dari negara demokratis, dan sebaliknya, demokrasi merupakan cara

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 106.

yang paling aman untuk mengontrol kekuasaan negara hukum. Prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) menggambarkan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, di mana hukum menjadi payung yang melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Di sisi lain, prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) menekankan bahwa negara demokratis harus diatur oleh konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak-hak dasar, dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah.²

Dengan memadukan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, sebuah negara dapat mencapai keseimbangan yang baik antara pemerintahan yang efektif dan perlindungan hak-hak individu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterkaitan antara demokrasi dan negara hukum dalam memastikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan masyarakat yang adil.

Al-Ghazali, seorang pemikir besar dalam sejarah pemikiran Islam, menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara agama dan politik dengan analogi yang kuat. Baginya, agama dan politik adalah dua elemen yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, mirip dengan dua anak kembar. Dalam pemikirannya, Al-Ghazali menggambarkan agama sebagai pondasi atau dasar yang kokoh bagi sebuah sistem sosial. Seperti pondasi bagi sebuah bangunan, agama memberikan kestabilan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Di sisi lain, politik dianggap sebagai penjaga atau pelindung dari pondasi tersebut. Sebagaimana fungsi penjaga atau pelindung, politik bertugas untuk menjaga agar nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama tetap terjaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.³

Dalam konteks ini, Al-Ghazali menekankan pentingnya pemimpin negara untuk memperhatikan aspek spiritual dan moral dalam kepemimpinannya, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan demikian, hubungan antara agama dan politik dipandang sebagai

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 87.

³ Abdul Karim Al-Usman, *Sirah Al-Ghazali*, (Beirut: Dar al-fikr, 1984), hlm. 7.

suatu kesatuan yang saling melengkapi dan mendukung dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara.

Dalam Islam, politik disebut dengan istilah "*siyasah*". *Siyasah* merujuk pada pengaturan atau pengelolaan segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan umat Muslim. Islam sangat memperhatikan dan menekankan pentingnya *siyasah*, yang merupakan bagian integral dari agama tersebut. Hasan Al-Banna memandang bahwa Islam tidak hanya merupakan agama yang mengatur urusan ritual dan spiritual, tetapi juga menyediakan pedoman yang jelas dalam masalah-masalah politik. Baginya, ajaran Islam menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk urusan pemerintahan dan keadilan sosial. Aspek politik dalam Islam, menurut pandangan Al-Banna, mencakup pemahaman tentang sistem negara yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip Islam, hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat, serta pengelolaan hukum dan undang-undang yang adil berdasarkan pada ajaran Islam.⁴

Kajian mengenai pandangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan hingga saat ini, perempuan masih mengalami ketidaksetaraan, yang tercermin dalam pandangan bahwa perempuan seharusnya hanya terlibat dalam pekerjaan domestik atau tugas rumah tangga. Dengan berjalannya waktu, perbedaan gender ini kemudian dianggap sebagai suatu takdir kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah. Inilah yang pada akhirnya menjadi akar penyebab terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.⁵

Islam mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana ajaran agama ini menegaskan bahwa perbedaan antara keduanya hanya terletak pada tingkat ketakwaan kepada Tuhan. Dalam konteks ini, pandangan yang merendahkan kaum perempuan haruslah diubah, sejalan

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tarbiyah Politik Hasan Al-Banna*, (Bintaro: Ihsan Media, 2018), hlm. 3.

⁵ Alfi Nursyifa dkk, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik" *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 1, 2023, hlm. 26.

dengan nilai-nilai keadilan, keamanan, ketentraman, dan kebaikan yang ditekankan oleh Al-Qur'an dalam hubungan antar gender.⁶

Dalam bidang Politik, partisipasi perempuan dalam politik merupakan isu krusial yang terus menjadi perhatian global. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk mendorong keterlibatan perempuan, kenyataannya, partisipasi mereka masih jauh dari harapan. Peran perempuan dalam pembangunan didasarkan pada kepentingan perempuan itu sendiri. Adanya tuntutan terhadap peran perempuan dalam pembangunan menciptakan pemahaman akan peran ganda atau mitra sejajar, yang tidak hanya membatasi perempuan pada peran tradisional, tetapi juga mendorong mereka untuk ambil bagian dalam ranah politik. Dalam konteks ini, perempuan didorong untuk ikut serta dalam kehidupan politik sebagai wakil dari komunitas mereka, terutama dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan.⁷

Penting untuk memahami bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya terbatas pada ranah politik semata. Perempuan Bangsa di Purbalingga sebagai badan otonom PKB membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi motor penggerak tidak hanya dalam arena politik, tetapi juga dalam konteks keagamaan. Keberagaman peran yang dimainkan oleh Perempuan Bangsa menciptakan dinamika yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Perempuan Bangsa, seperti bakti sosial, santunan anak yatim, dan pengajian akbar, memberikan dimensi baru terkait dengan kontribusi perempuan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkearifan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami peran perempuan dalam politik, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana

⁶ Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 56.

⁷ Rizki Priandi Dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 108.

kegiatan keagamaan mereka berkontribusi pada penguatan nilai-nilai keislaman di Purbalingga.

Penelitian ini diarahkan untuk mendalami pemahaman terhadap manajemen sumber daya manusia di Dewan pengurus Cabang PKB Purbalingga, khususnya dalam konteks politik dan kegiatan keagamaan. Manajemen adalah elemen yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian, yang dijalankan melalui kerjasama sekelompok individu, serta selalu berorientasi pada pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi.⁸

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan cabang dari manajemen yang fokus pada pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau kelompok. Dalam konteks MSDM, manajemen dapat didefinisikan sebagai sistem organisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia, alam, dan keuangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati.⁹

Penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia (SDM) pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Purbalingga dalam bidang keagamaan menjadi semakin kompleks mengingat peran partai politik dalam ranah keagamaan, terutama karena PKB merupakan partai politik yang lahir dari organisasi keislaman. Sebagai bagian dari organisasi keagamaan, PKB memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya manusia di PKB tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan politik partai, tetapi juga dengan penguatan peran partai dalam memajukan bidang keagamaan. Partai ini tidak hanya menjadi wadah politik, tetapi juga menjadi platform penting dalam mengedukasi dan mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial dan politik.

⁸ Awaluddin. "Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala", *Jurnal Publication*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm 5.

⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 7.

Peran PKB dalam bidang keagamaan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesadaran keagamaan, pemberdayaan masyarakat dalam hal-hal keagamaan, hingga penguatan institusi keagamaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, manajemen SDM di PKB di Purbalingga perlu mampu menjalankan peran ganda sebagai partai politik dan agen perubahan dalam bidang keagamaan. Tantangan ini menuntut pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sumber daya manusia, di mana kader-kader partai tidak hanya memiliki kompetensi politik, tetapi juga komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan.

Dalam menjalankan peran partainya dalam bidang keagamaan, PKB di Purbalingga aktif mengorganisir berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang mencakup beragam aspek kehidupan masyarakat. Salah satu kegiatan yang ditekankan adalah perayaan Hari Besar Islam, yang disebut Program Hibah Bina Iman (PHBI). Melalui PHBI, PKB berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keagamaan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat edukatif dan dakwah menjelang atau pada saat perayaan hari besar Islam. Selain itu, PKB juga aktif dalam kegiatan sosial seperti memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa, serta mengorganisir berbagai kegiatan bakti sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kepedulian sosial yang menjadi nilai inti dari partai.

Selain itu, PKB juga aktif dalam kegiatan sosial seperti memberikan santunan kepada anak yatim dan dhuafa, serta mengorganisir berbagai kegiatan bakti sosial lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kepedulian sosial yang menjadi nilai inti dari partai.

PKB juga melalui MASURA (Majelis Ulama Rakyat) memperkuat basis keagamaannya. MASURA merupakan wadah bagi ulama-ulama dan tokoh agama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Dalam kerangka ini, PKB berupaya memperkuat hubungan dengan ulama-ulama lokal dan memanfaatkan otoritas keagamaan mereka untuk mendukung agenda politik partai yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

Penting untuk dicatat bahwa PKB, sebagai partai politik yang lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan figur pendiri seperti Abdurrahman Wahid, memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dalam bidang keagamaan yang dijalankan oleh PKB tidak hanya menjadi strategi politik, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan misi partai untuk memajukan kehidupan beragama dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika manajemen sumber daya manusia dalam konteks yang kompleks ini menjadi penting bagi PKB di Purbalingga. Pengelolaan SDM yang efektif harus mampu memadukan antara aspek politik, keagamaan, dan sosial sehingga partai dapat tetap relevan dan efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuannya di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai manajemen SDM pada PKB di Purbalingga dalam bidang keagamaan menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana partai politik yang lahir dari organisasi keislaman menghadapi kompleksitas tugas dan tanggung jawabnya dalam memadukan aspek politik dan keagamaan dalam upaya mencapai tujuan politik dan keagamaannya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga”**

B. Penegasan Istilah

1. Partisipasi perempuan

Partisipasi perempuan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender, yang mencakup hak-hak ekonomi, hak reproduktif, dan hak-hak resmi lainnya yang tidak boleh diskriminatif. Pemberdayaan perempuan juga mencakup segala aspek kehidupan, termasuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-

laki dan perempuan, yang menjadi elemen kunci dalam upaya pemberdayaan tersebut.¹⁰

2. Manajemen

Manajemen adalah proses sosial yang direncanakan untuk memastikan kerjasama, partisipasi, dan keterlibatan sejumlah individu dalam pencapaian tujuan dan sasaran tertentu secara efektif. Dalam konsep ini, manajemen melibatkan aspek-aspek seperti pembimbingan, pengarahan, dan pengaturan sekelompok orang menuju pencapaian tujuan bersama.¹¹

Menurut George R. Terry dalam Erdiyanti, manajemen adalah proses khas yang meliputi tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengendalikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹² Sedangkan menurut Ricky W. Griffin dalam Subeki Ridhotullah, manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.¹³

Dalam penelitian ini manajemen akan di fokuskan kepada manajemen sumber daya manusia di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dianggap sebagai perpaduan antara seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur hubungan serta peran tenaga kerja secara efisien dan efektif. Pendekatan ini memungkinkan pencapaian tujuan yang optimal bagi organisasi, anggota, perusahaan, dan karyawan. Manajemen SDM meliputi berbagai proses

¹⁰ Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 149.

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Madrasah Aliyah*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Islam, 1998) hlm. 1.

¹² Erdiyanti, *Dasar-Dasar Manajemen* (Kendari: Shadra, 2009), hlm. 3.

¹³ Subeki Ridhotullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hlm. 1.

seperti seleksi, perekrutan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks organisasi dan perusahaan.¹⁴

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu konsep yang mencakup seni dan ilmu dalam mengelola tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Dalam konteks Partai Kebangkitan Bangsa di Purbalingga, konsep manajemen SDM menjadi semakin penting. Hal ini terutama karena PKB bukan hanya sebatas dalam ranah politik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek keagamaan dan kemanusiaan. Dalam implementasinya, manajemen SDM melibatkan proses seleksi dan perekrutan yang memastikan keberagaman dan inklusivitas, pemeliharaan melalui pelatihan dan pembinaan, serta pengembangan kapasitas dalam kegiatan politik, sosial, dan keagamaan. Dengan pendekatan manajemen SDM yang holistik, PKB mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dalam berbagai sektor, dan menggagas solusi inovatif.

C. Rumusan Masalah

Dalam konteks keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga, permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan praktik partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga

¹⁴ Pandi Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Zanaf Publishing, 2018) hlm. 3.

2. Manfaat Penelitian

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif dalam bidang keagamaan bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Purbalingga memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

a. Manfaat Teoritis

1) Pemantapan Identitas Partai

Dengan mengelola SDM yang berkualitas dalam bidang keagamaan, PKB dapat memperkuat identitasnya sebagai partai politik yang berbasis keagamaan dan mempertahankan visi, misi, dan nilai-nilai yang sesuai dengan keyakinan agamanya.

2) Konsistensi Ideologis

SDM yang dikelola dengan baik akan membantu PKB untuk mempertahankan konsistensi dalam menjalankan ideologi dan platform politiknya, terutama yang berkaitan dengan keagamaan, sehingga memperkuat legitimasi partai di mata pemilih.

3) Peningkatan Kredibilitas

Dengan memiliki kader-kader yang kompeten dan berkualitas dalam bidang keagamaan, PKB dapat meningkatkan kredibilitasnya sebagai wadah politik yang mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat berbasis keagamaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pembaca

- a) Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi perempuan dalam kegiatan keagamaan di lingkungan politik, khususnya dalam konteks PKB Purbalingga.
- b) Mendapatkan wawasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk memberdayakan perempuan dalam ranah keagamaan, yang dapat menjadi

inspirasi bagi pembaca untuk melakukan inisiatif serupa di tempat mereka.

2) Bagi Penulis

- a) Menambah literatur dan pengetahuan akademis tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan di PKB Purbalingga, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan bidang ini.
- b) Meningkatkan pemahaman terhadap dinamika peran gender dalam politik dan keagamaan, yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

3) Bagi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- a) Menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa dan dosen di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam mempelajari dan mendalami isu-isu partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan dan politik.
- b) Meningkatkan reputasi institusi dalam bidang penelitian yang relevan dengan isu-isu gender, politik, dan keagamaan, serta kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial masyarakat.

4) Efektivitas dalam Pencapaian Tujuan

Pengelolaan SDM yang baik membantu PKB untuk memobilisasi sumber daya manusia secara efektif dalam merumuskan dan mencapai tujuan partai dalam bidang keagamaan, seperti memperjuangkan kepentingan umat dan membangun masyarakat yang religius.

5) Peningkatan Kualitas Program dan Kegiatan

Kader-kader yang terampil dalam bidang keagamaan akan mampu merancang program-program dan kegiatan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal

agama, seperti penyelenggaraan acara keagamaan, pendidikan agama, dan pemberdayaan masyarakat.

6) Pemberdayaan Masyarakat

Melalui manajemen SDM yang baik, PKB dapat membantu memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, seperti penyuluhan agama, pembangunan sarana ibadah, dan pengembangan ekonomi berbasis keagamaan.

Dengan demikian, manajemen SDM yang efektif bagi PKB di Purbalingga dalam bidang keagamaan tidak hanya memberikan manfaat teoritis dalam memperkuat identitas dan konsistensi partai, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mencapai tujuan politiknya dan memberdayakan masyarakat dalam ranah keagamaan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai referensi untuk menghindari kesamaan dan plagiasi dengan penelitian serupa, peneliti mencantumkan beberapa karya sebelumnya, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Zaidan Achmad Madani berjudul "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Komunitas Rumah Lengger Banyumas" mengeksplorasi praktik manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan komunitas Rumah Lengger Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Rumah Lengger Banyumas menerapkan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan pendekatan yang terstruktur, mempertimbangkan aspek manajerial dan operasional. Aspek manajerial melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh George Robert Terry. Sementara itu, aspek operasional dari manajemen SDM melibatkan proses pengadaan SDM, pengembangan, pemberian kompensasi,

integrasi, dan pemeliharaan, yang dikelola oleh komunitas Rumah Lenggur Banyumas dengan memanfaatkan teori yang diajukan oleh Wilson Bangun.¹⁵

Perbedaan terletak pada Subjek penelitian dimana penelitian penulis dilakukan di PKB Purbalingga serta adanya objek lain yaitu bidang keagamaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Attika Savira Jasmine dengan judul "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Kepengurusan Komunitas Urup Project Purwokerto", ditemukan bahwa komunitas Urup Project Purwokerto menerapkan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur, dengan memperhatikan fungsi manajerial dan operasional. Fungsi manajerial dalam manajemen SDM melibatkan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang konsisten dengan konsep teori yang diperkenalkan oleh George Robert Terry. Di sisi lain, fungsi operasional dari manajemen SDM melibatkan aspek-aspek seperti pengadaan SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan SDM. Kepengurusan komunitas Urup Project Purwokerto menerapkan praktik-praktik ini dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Wilson Bangun.¹⁶

Perbedaan terletak pada Subjek penelitian dimana penelitian penulis dilakukan di PKB Purbalingga serta adanya objek lain yaitu bidang keagamaan.

Skripsi Lira Ayunda "Strategi Manajemen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan Di Dpd Golkar Tebing Tinggi" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) mengimplementasikan kegiatan ilmiah dengan fokus pada

¹⁵ Zaidan Achmad Madani, "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Komunitas Rumah Lenggur Banyumas" *skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen Dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Puwokerto 2023.

¹⁶ Attika Savira Jasmine, "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Kepengurusan Komunitas Urup Project Purwokerto" *Skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen Dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Puwokerto 2023.

tema kesetaraan gender. Mereka juga aktif dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial yang diprakarsai oleh bagian perempuan dari Partai Golongan Karya. Selain itu, partai ini secara konsisten melibatkan kader perempuan dalam penyelenggaraan setiap acara, memberikan dorongan kepada mereka bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin, terutama dalam konteks pencalonan dan kampanye, di samping pelaksanaan tindakan afirmatif. Meskipun demikian, Partai Golongan Karya memprioritaskan peningkatan kualitas kader perempuan yang mencalonkan diri melalui pelatihan dan kegiatan pengkaderan. Dari segi fungsional, pengawasan organisasi dilaksanakan untuk mengembangkan tugas dan fungsi peran kaum perempuan di DPD Golongan Karya Tebing Tinggi. Proses perencanaan dijalankan dengan baik, yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian digunakan untuk membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, sementara fungsi pengarahan manajemen diimplementasikan untuk menggerakkan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi pengawasan diterapkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Adanya motivasi juga diakui sebagai faktor kunci keberhasilan organisasi, yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golongan Karya Tebing Tinggi dan sayap organisasi mereka. Kesemuanya itu menggambarkan orientasi strategi manajemen organisasi yang produktif, dengan tujuan meningkatkan keaktifan kader perempuan di DPD Golongan Karya Tebing Tinggi.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini mencakup kerangka keseluruhan dari konten skripsi mulai dari awal hingga akhir, yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca tentang topik yang akan dibahas. Berikut adalah struktur dalam penelitian ini:

1. Bab I: Pendahuluan

¹⁷ Lira Ayunda “Strategi Manajemen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan Di Dpd Golkar Tebing Tinggi” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022.

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar ketertarikannya terhadap topik penelitian. Hal ini mencakup klarifikasi istilah yang digunakan untuk menjelaskan judul penelitian agar tidak terjadi penafsiran yang keliru. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah yang menunjukkan fokus penelitian terhadap pembahasan yang dikembangkan, tujuan, serta manfaat penelitian dalam memperluas pemahaman terhadap ruang lingkup yang ingin diteliti. Terakhir, bab ini mencakup tinjauan pustaka yang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta sistematika penelitian sebagai struktur bab-bab yang akan ditampilkan dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Bab II: Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang kerangka teori terkait Partisipasi Perempuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, partai politik, dan kegiatan keagamaan. Di sini, peneliti menguraikan konsep-konsep dasar dan teori yang menjadi landasan bagi penelitian yang dilakukan.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis data. Peneliti menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data.

4. Bab IV: Analisis dan Hasil Penelitian

Bab ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai subjek penelitian serta hasil penelitian tentang manajemen Sumber Daya Manusia di PKB Purbalingga dalam bidang Keagamaan. Peneliti menyajikan temuan dan analisis data yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Bab V: Kesimpulan, Saran, dan Penutup

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari temuan penelitian, saran untuk pengembangan lebih lanjut, dan penutup yang

menggambarkan hal-hal yang telah dibahas di dalam penelitian ini. Di sini juga dapat disertakan refleksi peneliti terhadap proses penelitian.

6. Daftar Pustaka

Bagian terakhir dari skripsi berisi daftar pustaka yang merupakan referensi dari sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Daftar pustaka disusun sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Partisipasi Perempuan

1. Pengertian Partisipasi Perempuan

Banyak pakar telah menjelaskan konsep partisipasi. Dilihat dari etimologinya, kata "partisipasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*Participation*", yang mengandung arti pengambilan bagian atau pengikutsertaan.¹⁸ Partisipasi merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui penyampaian ide dan pendapat maupun melalui keterlibatan dalam kegiatan konkret. Hal ini meliputi kontribusi dalam bentuk gagasan, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi, serta turut serta dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.¹⁹

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai proses di mana pembuat keputusan mengundang kelompok atau masyarakat untuk turut berperan dengan menyampaikan saran, pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Selain itu, partisipasi juga mencakup kesadaran kelompok akan masalah yang dihadapi, mengevaluasi berbagai pilihan, mengambil keputusan, dan mencari solusi untuk masalah tersebut.²⁰

Secara lebih luas, partisipasi adalah keterlibatan individu dalam situasi tertentu, baik secara mental, emosional, atau pikiran, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan turut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut.²¹

¹⁸ Dyah Putri Makhmudi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang," *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol 6 , No 2, November 2018.

¹⁹ Dhio, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri", *Jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM*, Vol 2, No 3.

²⁰ Satropoetro dan Santoso, *Partisipasi Komunikasi Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni.R.A, 2016), hlm. 32

²¹ Imanuel Agung Pamuji, "Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1. (2013).

Partisipasi perempuan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender, yang mencakup hak-hak ekonomi, hak reproduktif, dan hak-hak resmi lainnya yang tidak boleh diskriminatif. Pemberdayaan perempuan juga mencakup segala aspek kehidupan, termasuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi elemen kunci dalam upaya pemberdayaan tersebut.²²

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan tingkat keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi ini terjadi ketika individu secara langsung terlibat dalam suatu kegiatan partisipasi. Hal ini dapat berupa memberikan pandangan, berdiskusi tentang pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap pendapat orang lain, atau menyampaikan pendapat secara langsung.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi ini terjadi ketika individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada pihak lain. Partisipasi tidak langsung terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Ini terkait dengan penentuan alternatif yang melibatkan masyarakat dalam gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Contohnya adalah memberikan gagasan, hadir dalam rapat, diskusi, serta memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diajukan.

²² Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hlm. 149.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Meliputi menggerakkan sumber daya, dana, melakukan kegiatan administrasi, koordinasi, dan menjalankan program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya dalam perencanaan.

3) Partisipasi dalam Pemanfaatan

Terkait dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas dapat dilihat dari output program, sedangkan kuantitasnya dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

4) Partisipasi dalam Evaluasi

Berkaitan dengan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian program yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya.

Ada berbagai bentuk kegiatan partisipasi yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat.²³

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat: Ini mencakup bergabung atau menjadi anggota dalam berbagai kelompok atau organisasi di masyarakat, seperti kelompok seni, olahraga, atau keagamaan.
- b. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok: Ini melibatkan partisipasi dalam diskusi kelompok untuk membahas berbagai masalah atau topik tertentu yang relevan dengan kepentingan bersama.
- c. Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya: Ini mencakup menjadi aktif dalam organisasi sosial, politik, atau kemasyarakatan untuk memobilisasi

²³ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik* (Jakarta: Alfabeta 2013), hlm. 46.

partisipasi masyarakat lainnya dalam berbagai kegiatan atau program.

- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat: Ini termasuk mengorganisir atau mengkoordinasikan sumber daya masyarakat, seperti menggalang dana atau mengatur kegiatan sukarela untuk mendukung inisiatif atau program tertentu.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan: Ini melibatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, baik melalui pemilihan umum, musyawarah desa, atau forum partisipatif lainnya.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya: Ini mencakup memanfaatkan hasil-hasil atau manfaat dari berbagai kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, seperti pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya.²⁴

Manajemen, menurut beberapa ahli, merujuk pada serangkaian proses yang khas dan terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, manajemen melibatkan tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui

²⁴ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm.1

pemanfaatan sumber daya yang ada.²⁵ Harold Koontz dan Cyril O'Donnel menyatakan bahwa manajemen adalah kerja bersama-sama dengan orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.²⁶ Sementara itu, menurut penulis Pengantar Manajemen, manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.²⁷ Secara umum, manajemen juga dianggap sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dilakukan secara terus-menerus demi mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen telah mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan yang diajukan oleh perusahaan dan organisasi. Hal ini menyebabkan definisi-definisi yang diajukan oleh para ahli sangat beragam. Para ahli melihat manajemen dari berbagai perspektif yang berbeda. Secara umum, terdapat tiga pendekatan yang berbeda dalam memahami manajemen. Pertama, manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni, di mana aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam mengatur dan mengelola sumber daya. Kedua, manajemen dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian langkah-langkah terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ketiga, manajemen diidentifikasi sebagai sebuah profesi yang melibatkan praktik-praktik dan standar-standar tertentu yang harus dikuasai oleh individu yang berkecimpung di dalamnya. Dengan pemahaman yang luas tentang manajemen dari berbagai pendekatan ini, pemimpin

²⁵ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Realition Dan Media Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.1.

²⁶ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2011), hlm. 3.

²⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hlm. 2.

organisasi dapat mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk mengelola perusahaan atau organisasi mereka.²⁸

Dalam konsep manajemen, terdapat unsur-unsur penting yang sering dikenal dengan istilah "5M" yang diajukan oleh Harrington Emerson, seperti yang dijelaskan dalam karya Phiffner John F. dan Presthus Robert V. Unsur-unsur ini mencakup Man (tenaga kerja), Money (keuangan), Materials (bahan/material), Machinery (mesin/alat), dan Minutes (waktu). Kelima unsur ini merupakan fondasi yang penting bagi keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur ini merupakan komponen-komponen yang penting dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan memperhatikan dan mengelola kelima unsur ini secara efektif, manajemen dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Manajemen memiliki tugas-tugas khusus yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Definisi manajemen menekankan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan serta mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas guna mencapai tujuan, manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Fungsi-fungsi ini membantu manajer dalam mengelola proses dari awal hingga akhir: mulai dari merencanakan langkah-langkah yang akan diambil, mengorganisasi sumber daya yang tersedia, memberikan arahan kepada tim, hingga mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas. Sebagai contoh, setelah tujuan telah ditetapkan, manajer akan melakukan tindak lanjut dengan memeriksa apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum,

²⁸ Syaeful Rokim, "Manajemen Pendidikan Keagamaan "Majelis Ta'lim Azzikra" *Islamic Management*, Vol. 01 No. 02, 2018, hlm. 272.

²⁹ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. 6.

dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan hasil evaluasi yang diperoleh.³⁰

Dalam konteks Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), manajemen dianggap sebagai suatu sistem organisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk tenaga manusia, alam, dan keuangan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. MSDM melibatkan beberapa aspek kunci yang mencakup pendayagunaan, penilaian, pengembangan, pemberian imbalan, dan pengelolaan anggota organisasi atau kelompok yang terlibat.³¹

Menurut James A.F Stoner, MSDM dianggap sebagai prosedur organisasi yang bertujuan untuk menyediakan individu-individu anggota yang sesuai untuk ditempatkan di bagian pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya pada saat dibutuhkan oleh organisasi. Dengan demikian, MSDM tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, tetapi juga dengan upaya memastikan bahwa organisasi memiliki personil yang tepat dengan keterampilan dan kualifikasi yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi secara Gary Dessler memberikan pandangannya mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), menggambarannya sebagai kebijakan praktik yang diperlukan terhadap aspek individu atau sumber daya manusia. Praktik-praktik ini mencakup perekrutan, pelatihan, penyingkapan, penilaian, serta pemberian imbalan kepada karyawan. Dessler juga mendefinisikan Manajemen SDM sebagai seni dan ilmu yang melibatkan pengaturan hubungan dan peran tenaga kerja dengan efisien dan efektif, dengan tujuan agar tujuan organisasi, anggota, perusahaan, dan karyawan dapat dicapai secara optimal. Proses ini melibatkan seleksi, penarikan, pemeliharaan, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dalam konteks organisasi

³⁰ Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2011), hlm. 2.

³¹ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017). hlm. 7.

dan perusahaan. Dengan demikian, MSDM memiliki peran kunci dalam mencapai keberhasilan dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.³²

2. Fungsi-fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia

Wilson Bangun mengemukakan lima fungsi operasional dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), yang mencakup:

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia

Fungsi ini merupakan bagian penting dari aktivitas MSDM yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tujuannya adalah untuk mencapai target tertentu.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi agar dapat mencapai tujuan tertentu. Melalui pelatihan dan pengembangan, organisasi dapat memberikan manfaat dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas, kemampuan, pengetahuan, dan produktivitas karyawan.

c. Kompensasi

Fungsi ini melibatkan pemberian imbalan kepada tenaga kerja sebagai bentuk penghargaan yang dianggap layak dan adil. Ini mencakup berbagai bentuk kompensasi, seperti gaji, tunjangan, dan imbalan lainnya, sebagai motivasi dan pengakuan atas kontribusi karyawan.

d. Pengintegrasian

fungsi ini mencakup proses penyelarasan keinginan tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi. Pengintegrasian melibatkan motivasi kerja untuk mendorong karyawan dalam melaksanakan

³² Pandi Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018), hlm. 3.

tugasnya. Tingkat kepuasan kerja juga menjadi fokus, karena berdampak pada peningkatan kualitas kinerja.

e. **Pemeliharaan Sumber Daya Manusia**

Dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan sumber daya manusia, organisasi perlu melakukan pemeliharaan. Ini mencakup pembangunan komunikasi yang baik di lingkungan kerja untuk mencegah kesalahpahaman, serta perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek ini juga melibatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dari potensi kecelakaan dan masalah kesehatan fisik dan mental, yang dapat diatasi melalui penyediaan lembaga konsultan pekerjaan, pembimbingan, atau konseling.

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah sebuah entitas organisasi yang beroperasi secara nasional dan dibentuk melalui inisiatif bersama sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela bersatu atas dasar kesamaan visi, misi, dan aspirasi untuk mengadvokasi serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan utamanya adalah untuk memperjuangkan dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan landasan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.³³

Secara umum, partai politik dapat dianggap sebagai entitas yang terorganisir, di mana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan bersama. Mereka bertujuan untuk memperoleh dan mengamankan kekuasaan politik, biasanya melalui proses konstitusional, untuk menerapkan agenda-agenda mereka. Di Indonesia, peran partai politik saat ini sangat signifikan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang diatur dalam undang-undang. Sebagai

³³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

contoh, revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang disahkan oleh DPR-RI. Revisi ini juga merekomendasikan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dimulai pada Juni 2005.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terutama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), peran partai politik tetap dominan. Pasal 56 ayat 2 menegaskan bahwa pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu, Pasal 59 ayat 2 menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari total suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di wilayah yang bersangkutan. Pasal 59 ayat 3 mengamanatkan partai politik atau gabungan partai politik memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi bakal calon perseorangan, yang kemudian diproses melalui proses yang demokratis dan transparan. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat 4 menekankan bahwa dalam penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik harus mempertimbangkan pendapat dan tanggapan masyarakat. Pasal 59 ayat 6 menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon, dan pasangan calon tersebut tidak boleh diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.³⁴

Partai politik memegang peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selain mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, partai politik juga memiliki beberapa

³⁴ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia “ Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 118-119.

fungsi yang penting, salah satunya adalah sebagai media atau alat komunikasi politik. Komunikasi politik ini melibatkan aliran informasi dua arah, yang bergerak dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Dengan kata lain, peran partai politik dalam aliran komunikasi ini adalah sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat yang mereka layani. Ini memungkinkan adanya saling pengertian antara kedua belah pihak serta memperkuat hubungan antara pemimpin dan warga negara.

Adanya kekhawatiran terkait dengan keterbatasan akses bagi calon independen dalam proses pencalonan, di mana mereka hanya dapat mencalonkan diri melalui partai politik karena mekanisme penjurangan calon independen diatur oleh partai politik dan gabungan partai politik, menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam sistem pilkada yang mensyaratkan dukungan dari partai politik untuk mencalonkan seseorang, asas kedaulatan rakyat, yang menjadi inti dari demokrasi, mungkin menjadi tereduksi oleh peran partai politik yang bertindak sebagai perantara dalam proses pilkada.

Selanjutnya, peran strategis partai politik dalam proses demokratisasi harus diakui. Selain sebagai struktur politik yang beranggotakan individu dengan tujuan memperoleh kekuasaan dan posisi politik, partai politik juga berfungsi sebagai tempat bagi penyatuan aspirasi rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara terjadi melalui partai politik. Melalui partai politik, berbagai aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara teratur dan terorganisir.

Lebih lanjut, sistem kepartaian dapat bervariasi di setiap negara, namun dapat umumnya dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: sistem satu partai, sistem dwipartai, dan sistem banyak partai. Setiap

jenis sistem memiliki implikasi yang berbeda terhadap dinamika politik dan demokrasi dalam suatu negara.³⁵

- a. Keterbatasan akses bagi calon independen dalam proses pencalonan, di mana mereka hanya dapat mencalonkan diri melalui partai politik karena mekanisme penjaringan calon independen diatur oleh partai politik dan gabungan partai politik, menimbulkan pertanyaan serius tentang keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam sistem pilkada yang memerlukan dukungan partai politik untuk mencalonkan seseorang, asas kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari demokrasi mungkin tereduksi oleh peran partai politik sebagai perantara dalam proses pilkada.
- b. Selanjutnya, pentingnya peran strategis partai politik dalam proses demokratisasi harus diakui. Selain sebagai struktur politik yang beranggotakan individu dengan tujuan memperoleh kekuasaan dan posisi politik, partai politik juga berfungsi sebagai tempat bagi penyatuan aspirasi rakyat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara terjadi melalui partai politik. Melalui partai politik, berbagai aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara teratur dan terorganisir.
- c. Lebih lanjut, sistem kepartaian dapat bervariasi di setiap negara, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: sistem satu partai, sistem dwipartai, dan sistem banyak partai. Setiap jenis sistem memiliki implikasi yang berbeda terhadap dinamika politik dan demokrasi dalam suatu negara.

2. Partai Politik dalam Persfektif Islam

Islam dan politik memiliki hubungan yang erat dalam sebuah relasi yang berfungsi secara fungsional. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia, menyediakan doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan

³⁵ Abdul Rozak Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 84.

dengan politik. Salah satu konsep yang penting adalah konsep pemimpin. Dalam suatu masyarakat, keberadaan pemerintahan menjadi suatu kebutuhan yang vital. Islam juga mengenalkan konsep musyawarah, yang pada awalnya merupakan bentuk pengambilan keputusan yang demokratis. Selain itu, ungkapan "*baldah tayyibah wa rabb gafur*" menandakan ciri dari negara yang ideal dalam perspektif Islam. Dari sumber-sumber Islam, seperti sunnah Rasulullah, dikenal juga konsep-konsep seperti *imamah* (pemimpin), *umara'* (bentuk jamak dari *ami'r*, yang merujuk pada seorang penguasa), dan *ra'in* (pemimpin). Penafsiran politis dan implementasi dari doktrin-doktrin semacam ini membuat Islam dipahami sebagai sebuah simbol politik dan ideologi politik.³⁶

Jika dilihat dari perspektif kekuasaan, kehidupan politik dapat dibagi menjadi tiga aspek utama: pertama, sebagai sumber kekuasaan; kedua, sebagai distribusi kekuasaan; dan ketiga, sebagai pelaksanaan kekuasaan. Dalam kerangka Islam, sumber kekuasaan diyakini berasal dari Allah SWT. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada manusia secara umum sebagai wakil Allah SWT, dan kepada individu yang dikehendaki-Nya. Jika Allah memiliki kekuasaan yang absolut, maka manusia (masyarakat) dan individu adalah pemegang kekuasaan yang terbatas, termasuk kekuasaan politik yang diperolehnya melalui sunnatullah (ketentuan Allah). Dengan demikian, dalam pandangan Islam, kekuasaan politik yang dimiliki manusia adalah sebagai representasi dari kehendak dan pemberian Allah SWT.³⁷

Dalam ajaran Islam, terdapat tiga sumber kekuasaan yang diakui, yaitu Allah SWT, masyarakat, dan individu (perorangan). Namun, distribusi dan pelaksanaan kekuasaan merupakan hasil rekayasa manusia. Dalam konteks ini, Islam menekankan beberapa konsep etika yang penting seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Oleh karena

³⁶ Shaleh Putuhena, *Histografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: PT. Lkis, 2007), hlm. 257.

³⁷ Hasan Sho'ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran* (Surabaya: Risalah Gust, 1997), hlm. 153.

itu, Islam tidak hanya berperan sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai etika politik yang memberikan panduan dalam menjalankan kehidupan politik dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang luhur.³⁸

Hubungan antara Islam dan politik mencakup lebih dari sekadar sarana untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat. Islam tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik semata. Begitu pula, politik tidak hanya dipahami sebagai cara untuk menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan, karena hal ini akan mengaburkan tujuan politik secara keseluruhan dan mengabaikan kontribusi Islam terhadap politik secara menyeluruh. Seringkali dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami politik secara luas, kita dapat melihat korelasinya dengan Islam secara lebih jelas, memperjelas bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dapat membentuk pandangan dan tindakan politik yang lebih bermakna.³⁹

Dalam konteks Indonesia, korelasi antara Islam dan politik menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara. Hal ini tidak menghapus cita-cita Islam dan menghilangkan unsur Islam dalam peraturan politik di tanah air. Seberapa jauh Islam mampu memberikan inspirasi dalam pembentukan politik, bergantung pada sejauh mana kalangan Muslim dapat tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan serta menganalisis transformasi sosial yang terjadi.⁴⁰

D. Kegiatan keagamaan

1. Pengertian Kegiatan Keagamaan

Kegiatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "giat" yang memiliki makna rajin, bergairah, bersemangat, aktif,

³⁸ Hasan Sho'ub, *Islam* hlm. 158.

³⁹ Saleh Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: PT. Lkis, 2004), hlm. 201.

⁴⁰ Saleh Mahfudh, *Nuansa*, hlm. 202.

tangkas, dan kuat. Kata tersebut diberi awalan "ke" dan akhiran "an", yang mengindikasikan aktivitas, kegairahan, usaha, pekerjaan, kekuatan, dan ketangkasan dalam berusaha. Pengertian kegiatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas atau pekerjaan. Selain itu, kegiatan juga bisa merujuk kepada kekuatan atau ketangkasan dalam berusaha, sesuai dengan makna "giat" yang menjadi akar kata. Di sisi lain, keagamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berkaitan dengan agama. Definisi ini juga diperkuat oleh Poerwadarminta, yang menjelaskan bahwa keagamaan mencakup sifat-sifat yang terkait dengan agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama-agama.⁴¹

Pada dasarnya, kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pengertian tersebut tidak sepenuhnya akurat. Meskipun kegiatan dapat melibatkan upaya untuk mewujudkan atau mengaplikasikan iman ke dalam perilaku keagamaan, namun kegiatan itu sendiri tidak selalu terkait dengan aspek keagamaan. Kegiatan bisa mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan dalam berbagai konteks, tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan. Sehingga, sementara kegiatan dapat mencakup aspek keagamaan, tidak semua kegiatan memiliki dimensi keagamaan.

2. Bentuk Kegiatan Keagamaan

Pengertian yang Anda sampaikan tentang kegiatan keagamaan mengacu pada aktivitas yang diarahkan untuk memperdalam pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Tujuan utamanya adalah agar individu menjadi Muslim yang lebih beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, kegiatan keagamaan mungkin mencakup berbagai aktivitas seperti ibadah ritual, pembelajaran agama, sosialisasi nilai-nilai Islam, dan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan semangat keislaman.

⁴¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm. 19.

a. Sholat

Sholat adalah sebuah perbuatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah sholat diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang telah mencapai baligh dan berakal sehat, serta dalam keadaan suci, dengan pelaksanaannya lima kali sehari semalam. Sholat berjamaah merujuk pada pelaksanaan sholat oleh dua orang atau lebih, di mana satu orang menjadi imam yang memimpin, sementara yang lainnya mengikuti di belakangnya. Secara hukum, sholat berjamaah termasuk dalam kategori sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan.⁴²

b. Pengajian

Pengajian berasal dari kata "kaji", yang berarti meneliti atau mempelajari ilmu-ilmu agama Islam dengan tujuan menanamkan norma-norma agama melalui media tertentu, sehingga terwujud kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dengan ridho Allah SWT.⁴³ Pengajian merupakan salah satu unsur utama dalam syiar dan pengembangan agama Islam. Pengajian sering kali disebut juga sebagai dakwah Islamiyah, karena salah satu tujuan dakwah Islam adalah melalui pengajian. Pengajian merupakan jenis kegiatan yang bertujuan membentuk umat Muslim yang baik, beriman, bertaqwa, dan berbudi luhur.

Dalam penyelenggaraan pengajian, metode ceramah sering digunakan sebagai salah satu metode untuk menyampaikan materi dakwahnya. Pada dasarnya, ceramah atau pengajian bertujuan untuk menyeru dan mengajak umat beragama untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing, guna

⁴² Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 3*, (Jakarta: Daruss Sunnah, 2004), hlm. 869.

⁴³ Nanih Machendrawati Dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 152.

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT demi kebahagiaan hidup lahir dan batin.⁴⁴

c. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati dan merayakan hari-hari besar dalam agama Islam, sebagaimana biasanya dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Acara-acara ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar bersejarah dalam Islam, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, *Isra Mi'raj*, awal tahun *Hijriyah (1 Muharram)*, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan PHBI adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam hati individu.

Melalui kegiatan PHBI, berbagai peristiwa penting dan bersejarah dalam Islam diperkenalkan kepada masyarakat. Peringatan dan perayaan hari besar Islam bertujuan untuk melatih individu agar selalu berperan serta dalam upaya menyemarakkan syiar Islam dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan nilai-nilai baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun di masyarakat secara luas.⁴⁵

3. Sosial Keagamaan

Dalam konteks fokus sosial keagamaan, kita dapat menjelaskan teori kegiatan keagamaan dengan lebih spesifik. Salah satu teori yang relevan adalah teori "Sosial Keagamaan" yang menekankan peran keagamaan dalam membentuk dan memengaruhi interaksi sosial serta struktur masyarakat. Berikut adalah poin-poin kunci terkait teori Sosial Keagamaan dalam konteks kegiatan keagamaan:

⁴⁴ Asmuni Syuki, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), hlm. 105.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 24.

a. Integrasi Sosial

Kegiatan keagamaan menjadi sarana integrasi sosial dengan membentuk jaringan hubungan antarindividu dan kelompok yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan bersama. Melalui kegiatan seperti ritual keagamaan, pertemuan kelompok doa, atau kegiatan sosial berbasis agama, masyarakat terhubung dan saling mendukung dalam konteks keagamaan.

b. Solidaritas dan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan sosial keagamaan sering kali bertujuan untuk menciptakan solidaritas di antara anggota masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Misalnya, melalui program-program seperti santunan anak yatim, bakti sosial, atau dukungan terhadap fakir miskin, kegiatan keagamaan berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

c. Perubahan Sosial

Kegiatan keagamaan juga dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan perdamaian. Partisipasi dalam kegiatan seperti advokasi hak asasi manusia, penyelesaian konflik, atau pembangunan komunitas dapat menciptakan transformasi positif dalam masyarakat.

d. Penguatan Identitas dan Keharmonisan

Partisipasi dalam kegiatan keagamaan membantu memperkuat identitas keagamaan individu dan kelompok, sambil mendorong toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antaragama. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis di mana berbagai kelompok keagamaan dapat hidup berdampingan secara damai.

Dengan demikian, melalui pendekatan fokus sosial keagamaan, kita dapat melihat bagaimana kegiatan keagamaan tidak hanya

memenuhi kebutuhan spiritual individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial, perubahan positif, dan harmoni dalam masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi kompleksitas dan konteks dari fenomena tersebut, serta memahami perspektif dan pengalaman langsung dari partisipan penelitian. Metode kualitatif sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makna, persepsi, dan pengalaman individu, serta untuk mengungkapkan dinamika sosial yang kompleks.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau konteks tertentu secara mendalam. Salah satu ciri khasnya adalah fokus pada pengungkapan makna, proses, dan interpretasi individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Penelitian kualitatif juga dianggap cocok untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang sulit diukur dengan metode kuantitatif atau statistik.⁴⁶

Dalam konteks penelitian yang dijelaskan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi lapangan (*field research*) di Bangsa PKB Purbalingga. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti melakukan pengamatan yang intensif terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diamati dan untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

⁴⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan utama. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu atau kelompok. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna di balik suatu fenomena dengan lebih mendalam.⁴⁷

Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peneliti berperan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Hal ini dapat memunculkan berbagai isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian. Peneliti harus sensitif terhadap interaksi dengan subjek penelitian dan menjaga etika dalam mengumpulkan data.⁴⁸

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah di PKB Purbalingga yang berlokasi di Kelurahan Kembaran Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan kantor pusat atau markas PKB Purbalingga, yang merupakan pusat kegiatan dan pengambilan keputusan bagi partai tersebut di tingkat lokal.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada periode tahun 2023-2024. Waktu penelitian yang dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut hingga tahun 2024 memberikan konteks waktu yang penting untuk memahami periode di mana data-data dikumpulkan, analisis dilakukan, dan temuan-temuan penelitian dihasilkan. Hal ini membantu dalam mencatat perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan di PKB Purbalingga selama periode tersebut.

⁴⁷ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", dimuat dalam *jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm. 50.

⁴⁸ Jhon W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 264.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi atau data yang relevan dalam latar penelitian.⁴⁹ Dalam skripsi ini, subjek penelitian mencakup:

- a. Basyir Fadlulloh selaku Ketua Dewan Syuro.
- b. Puput Adi Purnomo selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga.
- c. Siti Mutmainah selaku Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga.
- d. Siti Rofingah selaku Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama dari penelitian, yaitu aspek atau entitas yang akan diselidiki.⁵⁰ Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah manajemen Sumber daya manusia di PKB Purbalingga dalam bidang Keagamaan.

D. Penentuan informan

Penentuan informan adalah proses dalam metodologi penelitian di mana peneliti memilih individu atau kelompok yang akan dijadikan sumber data untuk studi mereka. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang cermat terhadap kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan merupakan pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan topik penelitian. Proses penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu:

Pemilihan informan kunci didasarkan pada posisi mereka dalam struktur partai dan potensi kontribusi mereka terhadap pemahaman yang mendalam tentang partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan.

⁴⁹ Ahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

⁵⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 199.

Sementara itu, informan pendukung dipilih berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka yang dapat memberikan konteks tambahan dan perspektif yang beragam dalam penelitian.

1. Informan Kunci

a. Basyir Fadlulloh

Memegang posisi strategis dalam struktur partai, sebagai Ketua Dewan Syuro, Basyir Fadlulloh memiliki wawasan yang mendalam tentang kebijakan dan arah strategis partai, termasuk dalam hal partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan. Sebagai tokoh penting dalam pengambilan keputusan, pandangannya akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan partai terhadap isu-isu keagamaan dan perempuan.

b. Siti Rofingah

Sebagai Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa, Siti Rofingah memegang peran sentral dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan di PKB Purbalingga. Sebagai pemimpin badan otonom yang fokus pada perempuan, pandangan dan pengalamannya akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan, strategi, dan dampak dari upaya pemberdayaan perempuan dalam konteks keagamaan. Sebagai informan kunci, pandangannya akan menjadi titik fokus utama dalam memahami dinamika partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan di PKB Purbalingga.

2. Informan Pendukung

a. Puput Adi Purnomo

Sebagai Sekretaris Partai, Puput Adi Purnomo memiliki akses langsung terhadap informasi dan kegiatan internal partai. Peranannya dalam mengorganisir dan menjalankan kegiatan sehari-hari partai membuatnya memiliki pemahaman yang

komprehensif tentang berbagai aspek partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan.

b. Siti Mutmainah

Meskipun posisinya sebagai Bendahara, Siti Mutmainah dapat memberikan perspektif yang berharga tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan dapat berdampak pada aspek keuangan partai. Pengalamannya dalam mengelola sumber daya keuangan partai dapat memberikan gambaran tentang pentingnya peran perempuan dalam memperkuat aspek keagamaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam penelitian sosial keagamaan, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Secara umum, observasi mengacu pada tindakan penglihatan atau pengamatan suatu situasi atau peristiwa. Lebih khususnya, observasi melibatkan pengamatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendengar, memahami, dan mencari jawaban melalui partisipasi langsung di lapangan. Dalam banyak kasus, peneliti juga harus berperan seperti yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam situasi yang sama atau berbeda. Melalui observasi ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik, interaksi, dan dinamika sosial dalam konteks keagamaan, yang mungkin sulit dipahami melalui metode-metode lain. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma keagamaan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

⁵¹ Sudarman Danim, *Menjadi Penelitian Presentasi dan Publikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 123.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penting dalam penelitian yang melibatkan percakapan langsung dan tatap muka antara peneliti dan subjek atau sekelompok subjek penelitian. Wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian sosial keagamaan, wawancara merupakan alat yang efektif untuk mendapatkan data yang valid tentang pengalaman dan aktivitas subjek penelitian di lapangan.⁵²

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik ini mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan cara yang lebih santai, sambil tetap memiliki pedoman atau catatan pokok yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, wawancara dapat berlangsung secara alami dan responsif terhadap respons dan pengalaman yang dibagikan oleh responden.

Wawancara yang dilakukan secara satu-satu dengan informan juga dapat menghasilkan data yang lebih mendalam dan mendetail. Selain itu, penggunaan teknik tertulis dalam wawancara memungkinkan peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang memanfaatkan catatan atau dokumen yang telah ada untuk mengumpulkan data tentang peristiwa atau variabel yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang mencatat informasi atau kejadian yang sudah berlalu.⁵³ Metode dokumentasi merupakan pelengkap yang

⁵² Sudar Wabdabun, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rokat Press 2013), hlm. 329.

penting dalam penelitian kualitatif dan sering digunakan bersama dengan metode observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses yang melibatkan perincian dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Proses analisis ini melibatkan pengelompokan, kategorisasi, serta pengamatan terhadap hubungan antar bagian data, serta identifikasi perbedaan dan persamaan di dalamnya. Dalam kata lain, analisis adalah langkah untuk memahami, merinci, dan menggambarkan data dengan lebih baik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Proses ini dimulai setelah data terkait dengan penelitian telah terkumpul, di mana data tersebut diorganisir dan diperinci dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk menggambarkan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Dalam analisis deskriptif kualitatif, peneliti berfokus pada mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan mengeksplorasi karakteristik, pola, tema, dan konteks dari data kualitatif yang terkumpul. Proses ini melibatkan pembacaan, pencarian pola-pola atau tren, kategorisasi data, dan penyusunan narasi yang menggambarkan temuan penelitian. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang topik penelitian, serta memfasilitasi interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diamati.⁵⁴

Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan rincian masalah yang ada. Proses ini melibatkan penggunaan pemikiran deduktif-induktif, yang memungkinkan peneliti untuk menghubungkan data dengan cara yang sistematis. Dengan pendekatan deduktif, peneliti menggunakan kerangka kerja atau teori yang ada sebagai panduan untuk mengorganisir dan menganalisis data. Sementara itu, pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola

⁵⁴ Mohlm. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press 2010), hl. 250.

atau tema yang muncul dari data itu sendiri, tanpa bergantung pada kerangka kerja atau teori yang telah ada. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti, serta mengembangkan temuan yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Proses pemilahan dan pengelompokan data ini penting untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut dan penyusunan narasi yang koheren dalam laporan penelitian.

Selama proses analisis, penulis juga melakukan koreksi data jika ditemukan kekurangan atau jika data tertinggal. Hal ini menunjukkan kehati-hatian peneliti dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah data yang lengkap dan akurat. Jika diperlukan, penulis juga dapat melakukan observasi tambahan untuk melengkapi data.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dalam proses penelitian di mana data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi akan mengalami proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi. Pada tahap ini, semua data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teliti untuk memisahkan data yang relevan sesuai dengan kerangka konseptual dan tujuan penelitian. Tujuan utama dari reduksi data adalah memastikan bahwa konteks yang cukup untuk temuan penelitian terpenuhi, dan agar peneliti dapat lebih memfokuskan perhatian pada topik yang sedang dikaji. Proses ini melibatkan penyaringan dan penghapusan data yang tidak relevan atau tidak signifikan, serta identifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang tersisa. Dengan demikian, reduksi data memungkinkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek yang paling penting dan relevan dari data yang telah terkumpul, sehingga memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.⁵⁵ Dengan kata lain, reduksi data membantu

⁵⁵ Samsul Hadi, *Metode Riset Evaluasi*, (Yogyakarta: CV Aswaja Presindo, 2011), hlm. 261-262.

peneliti untuk mempersempit fokus penelitian dan mengekstraksi informasi yang paling relevan dan penting.

Proses reduksi data juga dapat menghasilkan rangkuman atau abstraksi penting dari hasil pengumpulan data. Ini membantu dalam menyajikan temuan penelitian secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan demikian, reduksi data merupakan langkah penting dalam penyusunan dan analisis data dalam penelitian Anda.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁵⁶ Proses penyajian data merupakan salah satu tahap penting dalam analisis data. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk ringkasan naratif, pembuatan bagan, serta menunjukkan hubungan antar kategori yang relevan. Penyajian data ini bertujuan untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau audiens dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Ringkasan naratif dapat digunakan untuk menggambarkan temuan secara verbal, dengan menguraikan pola atau tema yang muncul dari analisis data. Pembuatan bagan atau diagram dapat membantu visualisasi hubungan antar konsep atau kategori dalam data, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami struktur dan kompleksitas informasi. Selain itu, menunjukkan hubungan antar kategori yang relevan dapat membantu menggambarkan pola atau tren yang ditemukan dalam data, serta memperkuat argumentasi atau interpretasi peneliti. Dengan menggunakan berbagai metode penyajian data ini, peneliti dapat menyampaikan hasil penelitian secara efektif dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti kepada pembaca atau audiens.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode*. hlm. 249.

Dalam tahap penyajian data ini, informasi yang diperoleh dari hasil penelitian akan dipresentasikan dalam bentuk narasi atau uraian. Hal ini memungkinkan pembaca atau peneliti lainnya untuk memahami dengan lebih baik temuan-temuan penelitian dan hubungan antara data yang ada. Penyajian data menjadi langkah penting dalam memperjelas hasil penelitian dan menggambarannya dalam format yang lebih terstruktur agar dapat dipahami oleh audiens yang berbeda.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, sesuai dengan pendekatan Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan dalam tahap ini masih bersifat sementara, dan dapat berubah seiring dengan pengumpulan data yang lebih lanjut jika bukti-bukti yang mendukung tidak ditemukan.⁵⁷

Dengan demikian, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk merangkum dan mengambil inti dari berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan disajikan dalam bentuk deskriptif yang sesuai dengan objek penelitian. Proses penarikan kesimpulan melibatkan sintesis dari temuan-temuan utama yang diidentifikasi selama analisis data, serta pemaparan tentang implikasi temuan tersebut terhadap topik penelitian dan konteks yang lebih luas. Kesimpulan juga dapat mencakup perumusan hipotesis atau saran-saran untuk penelitian lanjutan, serta refleksi terhadap keterbatasan penelitian dan relevansi hasil penelitian dalam konteks praktis atau teoretis. Dengan menyajikan kesimpulan yang jelas dan komprehensif, peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang fenomena yang diteliti dan mendorong perkembangan pengetahuan di bidang tersebut.

Pentingnya penarikan kesimpulan adalah untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode*, hlm. 345.

pemahaman yang telah diperoleh dari analisis data. Kesimpulan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan rekomendasi atau langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian atau tindakan lebih lanjut.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Tentang DPC PKB Purbalingga

1. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa⁵⁸

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Indonesia sebagai respons terhadap tekanan yang kuat dari arus reformasi. Arus reformasi ini dimulai dari berbagai diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, hingga istighosah yang mengalir deras di seluruh negeri.

Peristiwa ini menjadi titik awal lahirnya Era Reformasi di Indonesia. Sehari setelah peristiwa bersejarah tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menerima berbagai usulan dari warga Nahdliyin di seluruh Indonesia.

Usulan-usulan yang masuk ke PBNU bervariasi, mulai dari usulan untuk membentuk partai politik hingga usulan nama-nama untuk partai tersebut. Terdapat 39 nama partai yang diusulkan, dengan nama-nama seperti Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa menjadi yang paling banyak diusulkan.

Selain itu, ada juga usulan terkait lambang partai, hubungan dengan NU, visi dan misi, AD/ART, hingga nama-nama untuk menjadi pengurus partai. Meskipun PBNU merespons usulan-usulan ini dengan hati-hati, menyadari bahwa NU secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik dan tidak melakukan kegiatan politik praktis, banyak warga NU yang tidak sabar dan mendeklarasikan berdirinya partai politik untuk mewadahi aspirasi politik mereka.

Untuk menanggapi aspirasi ini, PBNU kemudian membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima dipimpin oleh tokoh NU ternama seperti KH Ma'ruf Amin dan KH M Dawam Anwar.

⁵⁸ Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024

Selanjutnya, PBNU membentuk Tim Asistensi yang bertugas membantu Tim Lima dalam mengumpulkan usulan-usulan dari warga NU dan membantu dalam proses pembentukan partai politik baru. Akhirnya, setelah melalui berbagai proses musyawarah dan pengambilan keputusan, pada tanggal 29 *Rabiul Awal* 1419 H atau 23 Juli 1998, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi dideklarasikan di Jakarta.

PKB kemudian mengalami peningkatan suara yang signifikan dalam pemilihan umum, terutama pada pemilu 2014 di mana partai ini berhasil meraih 11.292.151 suara atau setara dengan 47 kursi di DPR RI. Hal ini tidak lepas dari strategi politik yang cerdas dan motivasi tinggi dari kepemimpinan PKB, terutama oleh H. Abdul Muhaimin Iskandar, serta dukungan besar dari tokoh NU seperti Gus Dur dan kiai-kiai lainnya.

Keberhasilan PKB dalam mengibarkan bendera kejayaannya juga menandai peran penting agama dalam politik di Indonesia, di mana PKB berhasil mengantarkan 85 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia dalam Pilkada serentak pada tahun 2015.

Prestasi-prestasi PKB ini membuktikan bahwa partai tersebut berhasil menjalankan visi dan misinya sebagai partai politik berbasis nasionalis religius. Keberhasilan ini juga menunjukkan peran penting Gus Dur dan tokoh-tokoh NU lainnya dalam mendongkrak suara PKB, serta strategi politik yang cerdas yang diterapkan oleh para pemimpin partai.

Sebagai partai politik yang bercita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab, PKB terus berupaya memperkuat posisinya dengan membangun sinergi antara NU dan partai politiknya. Sinergi ini menjadi landasan kuat dalam memotivasi anggota partai untuk berjuang lebih keras dalam meraih kemenangan dalam setiap pesta demokrasi.

Selain itu, PKB juga terlibat aktif dalam menghadapi dinamika politik nasional dengan menjalin kerja sama dengan partai politik lainnya yang memiliki visi dan misi yang sejalan. Hal ini menunjukkan komitmen PKB dalam membangun politik yang inklusif dan mengedepankan kerja sama antarpolitical untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan bangsa dan negara.

Dengan demikian, PKB telah membuktikan peran pentingnya dalam politik Indonesia sebagai representasi aspirasi politik dari warga NU dan masyarakat umum, serta kontribusi positifnya dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan keberagaman dalam masyarakat.

2. Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa⁵⁹

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya,

⁵⁹ Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024

terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarnya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridloi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah. Maka dengan memohon *rahmat, taufiq, hidayah*, dan *inayah* Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

3. *Mabda` Siyasi*⁶⁰

- a. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala *situasi* (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan

⁶⁰ Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024

demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

- c. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
- d. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
- f. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.
- g. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan

kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

- h. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (*insaniyah diniyah*), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
- i. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

4. Visi dan Misi⁶¹

a. Visi

- 1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- 3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

b. Misi

- 1) Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
- 2) Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- 3) Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- 4) Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- 5) Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

⁶¹ Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024

5. Asas dan Prinsip Perjuangan⁶²

a. Asas

Partai Kebangkitan Bangsa berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Prinsip Perjuangan

Prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljamaah*.

6. Struktur Organisasi⁶³

a. Dewan Mustasyar

- 1) Slamet Wakhidin Al Hanafi
- 2) Kh. Nurkholis Ahmadi
- 3) Drs. H. Ahmad Khotib, M.Pd
- 4) H. Suroso Abdul Rozak
- 5) Kh. Farid Santosa
- 6) Ny. Hj. Hamdiyatun
- 7) Kh. Roghib Abdurrohman
- 8) Ny. Siti Rofingah
- 9) K. Imron Rosyadi, Ba
- 10) Kh. Ja'farudin, S.H
- 11) Kh. Fitron Ali Sofyan, S.Ag
- 12) Drs. H. Yusro
- 13) Kh. Hamam Soleh
- 14) Kh. Muhammad Toha Umar, Ma

⁶² Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024

⁶³ Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024

- 15) K. Slamet Sajaah
- 16) K. Tohirin Al Ayubi
- 17) Kh. Muhtamil
- 18) Kh. Musonef
- 19) K. Afid Mubayin
- 20) K. Mustaid Bilah
- 21) H. Ahmad Khoeroji

b. Dewan Syura

Ketua	: Kh. Basyir Fadlulloh, M.Pd.I
Wakil Ketua	: Miswanto, M.Pd
Wakil Ketua	: Drs. H. Mustangin
Wakil Ketua	: K. Khoeron Akhmad
Anggota	: K. Usman Syarif
Anggota	: K. Rokhedi
Anggota	: K. Lukman
Anggota	: K. Mohamad Tuslam Nawawi
Anggota	: K. Bagus Guritno
Anggota	: K. Anwar Priyanto
Anggota	: K. Ali Mansyur Suyitno
Anggota	: K. Mahsus Khamsi
Anggota	: K. Untung Mulyono, Ba
Anggota	: K. Muhammad Nasir
Anggota	: Drs. Lukmanudin
Anggota	: Kh. Durrofik, S.Pd.I
Anggota	: H. Hamid, S.H.
Sekretaris	: Wily Rose Dhani Abdullah, Se
Wakil Sekretaris	: Ust. Toha Nur Fais
Wakil Sekretaris	: Ust. Achmad Mislam
Wakil Sekretaris	: Ust. Ahmad Mufaqih
Wakil Sekretaris	: Ust. Ibnu Ibrahim

c. Dewan Tanfidz

Ketua	: H. Mukhlis, S.Ag (Alm)
Plt	: Kh. Basyir Fadlulloh, M.Pd.I
Wakil Ketua	: Endaryanto, S.H.
Wakil Ketua	: Sunarwin Akhmad Sugiarto
Wakil Ketua	: Arif Mukhyidin
Wakil Ketua	: Suprpto
Wakil Ketua	: Uswatun Chasanah
Wakil Ketua	: Ma'ruf Ridho
Wakil Ketua	: Mokhamad Mahbub, A.Md
Wakil Ketua	: Ika Haryanti, S.Sos
Wakil Ketua	: Sumyati, S.Pd
Wakil Ketua	: Rokhis
Wakil Ketua	: Sukanti
Wakil Ketua	: Sugeng Riyadi
Wakil Ketua	: Bambang Hermanto, S.H.
Wakil Ketua	: Hadi Iswanto
Sekretaris	: Puput Adi Purnomo
Wakil Sekretaris	: Hanif Wahyudi, S.T
Wakil Sekretaris	: Moh. Sulhan
Wakil Sekretaris	: Siti Khasanah
Wakil Sekretaris	: Vandi Romadhon, S.Pd.I
Bendahara	: Siti Mutmainah, S.Ag
Wakil Bendahara	: H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si
Wakil Bendahara	: Suyanto
Wakil Bendahara	: Uxy Minanti, A.Md.,Keb.
Wakil Bendahara	: Helmy Muchasin
Wakil Bendahara	: Umiyatun

B. Manajemen Sumber Daya Manusia PKB Purbalingga

1. Rekrutmen dan Seleksi Kader

Rekrutmen dan seleksi kader merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga dalam bidang keagamaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kader yang direkrut memiliki kompetensi, dedikasi, dan integritas yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan misi partai.

Pertama-tama, dalam proses rekrutmen, PKB Purbalingga cenderung mengutamakan individu-individu yang memiliki keterkaitan dan kepedulian terhadap urusan keagamaan di masyarakat. Ini bisa termasuk tokoh-tokoh agama lokal, para aktivis keagamaan, atau individu yang memiliki rekam jejak dalam organisasi-organisasi keagamaan di daerah tersebut.

Selanjutnya, dalam proses seleksi, PKB Purbalingga melakukan penilaian yang cermat terhadap calon kader, baik dari segi kompetensi keagamaan, kemampuan kepemimpinan, maupun kesesuaian nilai-nilai partai. Calon kader juga dievaluasi berdasarkan dedikasi dan kesediaannya untuk berkontribusi dalam menjalankan program-program keagamaan yang telah ditetapkan oleh partai.

Secara keseluruhan, proses rekrutmen dan seleksi kader PKB Purbalingga dalam bidang keagamaan menekankan pada pemilihan individu-individu yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keagamaan dan misi partai. Dengan demikian, partai dapat memastikan bahwa SDM yang dimilikinya dapat efektif dalam menjalankan program-program keagamaan serta memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat melalui aksi-aksi yang konsisten dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut.

Proses rekrutmen kader perempuan di PKB Purbalingga melibatkan beberapa tahapan, termasuk penetapan kriteria dan penilaian

komitmen kader. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua tahapan tersebut:

a. Penetapan Kriteria

Tahap awal dalam proses rekrutmen adalah penetapan kriteria yang jelas tentang calon kader perempuan yang diinginkan oleh partai. Kriteria ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

1) Komitmen terhadap nilai-nilai partai

Calon kader diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh PKB Purbalingga, termasuk nilai-nilai keagamaan, sosial, dan politik.

2) Keterampilan komunikasi

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam kegiatan politik. Calon kader perempuan diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan anggota partai dan masyarakat.

3) Dedikasi terhadap kegiatan keagamaan

PKB Purbalingga sebagai partai yang berbasis keagamaan menekankan pentingnya kegiatan keagamaan dalam aktivitas partai. Oleh karena itu, calon kader diharapkan memiliki dedikasi dan kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan keagamaan.

b. Penilaian Komitmen Kader

Selama proses seleksi, salah satu aspek yang dievaluasi adalah tingkat komitmen calon kader terhadap partai dan kegiatan keagamaan. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap partisipasi dan kontribusi mereka dalam kegiatan partai dan keagamaan. Faktor-faktor yang dapat dievaluasi termasuk:

1) Kehadiran dalam kegiatan partai dan keagamaan

Tingkat partisipasi calon kader dalam kegiatan seperti rapat-rapat partai, kegiatan sosial keagamaan, dan peringatan hari-hari besar keagamaan dapat menjadi indikator komitmen mereka.

2) Kontribusi dalam kegiatan partai dan keagamaan

Selain kehadiran, juga dievaluasi kontribusi nyata yang diberikan oleh calon kader dalam mendukung dan memajukan kegiatan partai dan keagamaan. Ini dapat mencakup pengorganisasian acara, menyumbangkan ide-ide baru, dan berperan aktif dalam kampanye partai.

Dengan penetapan kriteria yang jelas dan penilaian komitmen kader yang cermat, PKB Purbalingga dapat memastikan bahwa calon kader perempuan yang terpilih adalah mereka yang memiliki komitmen yang kuat terhadap partai dan siap untuk berperan aktif dalam kegiatan politik dan keagamaan.

Hasil wawancara dengan Basyir Fadlulloh, Ketua Dewan Syuro PKB Purbalingga, memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses rekrutmen dan seleksi kader dalam konteks keagamaan.

PKB Purbalingga memperhatikan dengan seksama latar belakang dan rekam jejak calon kader dalam hal keagamaan. Mereka mencari individu yang memiliki kompetensi keagamaan yang kuat, seperti pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, keterampilan dalam memberikan ceramah keagamaan, dan kemampuan untuk memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat. Kader PKB Purbalingga harus memiliki karakter yang baik dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Mereka harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam praktek keagamaan sehari-hari.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa PKB Purbalingga tidak hanya melihat kualifikasi teknis calon kader, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan keagamaan dalam proses

⁶⁴ Hasil wawancara Ketua Dewan Syuro Basyir Fadlulloh pada tanggal 17 maret 2024.

rekrutmen dan seleksi. Hal ini menunjukkan komitmen partai dalam memilih kader-kader yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan kegiatan keagamaan dan penguatan nilai-nilai agama dalam masyarakat.

2. Pengembangan Kader dan Pelatihan

Pengembangan kader dan pelatihan merupakan langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga dalam bidang keagamaan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan kader agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat.

PKB Purbalingga menyadari pentingnya investasi dalam pengembangan kader, terutama dalam konteks keagamaan. Oleh karena itu, partai ini menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan workshop yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta keterampilan sosial dan organisasional kader-kader partai.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh PKB Purbalingga mencakup berbagai tema. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa kader-kader memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara efektif.

Pengembangan kader dan pelatihan merupakan bagian penting dari proses pembinaan anggota partai, termasuk khususnya para kader perempuan di PKB Purbalingga. Berikut adalah beberapa bentuk pengembangan kader dan pelatihan yang dapat dilakukan:

a. Pelatihan Kepemimpinan

Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi para kader perempuan, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam mengemban tugas dan

tanggung jawabnya di tingkat partai, masyarakat, maupun keagamaan.

b. Pelatihan Politik

Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang proses politik, tata cara partai, strategi kampanye, manajemen risiko politik, dan keterampilan komunikasi politik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para kader perempuan dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

c. Pelatihan Keagamaan

Pelatihan ini fokus pada pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan, pemahaman agama, serta keterampilan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, dakwah, dan pembinaan spiritual. Pelatihan ini penting untuk memperkuat komitmen dan peran kader perempuan dalam kegiatan keagamaan di PKB Purbalingga.

d. Pelatihan Manajemen Organisasi

Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang manajemen organisasi, pengorganisasian acara, manajemen waktu, pengelolaan sumber daya, dan keterampilan administrasi. Hal ini membantu para kader perempuan dalam mengelola kegiatan partai secara efektif dan efisien.

e. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kader perempuan tentang sistem politik dan tata kelola pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi. Hal ini membantu mereka menjadi agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan masyarakat.

Melalui berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan kader ini, PKB Purbalingga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas para kader

perempuan dalam berkontribusi secara positif dalam kegiatan partai, politik, dan keagamaan.

Hasil wawancara dengan Basyir Fadlulloh, Ketua Dewan Syuro PKB Purbalingga, menunjukkan bahwa:⁶⁵

Partai sangat memperhatikan pengembangan kader dalam bidang keagamaan. Menurut Basyir Fadlulloh, PKB Purbalingga secara rutin mengadakan kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kader-kader partai dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan mendukung program-program keagamaan yang dilaksanakan oleh partai.

Dengan demikian, pengembangan kader dan pelatihan merupakan aspek penting dalam manajemen SDM PKB Purbalingga dalam bidang keagamaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kader-kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan dengan baik dan efektif.

3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga dalam bidang keagamaan. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kader-kader partai dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki.

PKB Purbalingga melakukan evaluasi kinerja kader secara rutin, baik melalui mekanisme internal partai maupun melalui wawancara dan diskusi langsung dengan kader-kader terkait. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, serta kontribusi yang diberikan dalam memajukan agenda-agenda keagamaan partai.

Wawancara dengan Puput Adi Purnomo, Sekretaris PKB Purbalingga, menunjukkan bahwa:⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara Ketua Dewan Syuro Basyir Fadlulloh pada tanggal 17 maret 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara Puput Adi Purnomo, selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga pada tanggal 17 maret 2024.

Evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan terstruktur. Puput menyatakan bahwa partai mengadakan pertemuan evaluasi secara berkala, di mana kader-kader dievaluasi berdasarkan pada kinerja mereka dalam mengimplementasikan program-program keagamaan yang telah ditetapkan oleh partai.

Selama evaluasi kinerja, kader-kader diberikan kesempatan untuk menyampaikan pencapaian mereka, kendala-kendala yang dihadapi, serta saran-saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap komitmen dan integritas kader dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan sesuai dengan nilai-nilai partai.

Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait dengan penghargaan, promosi, atau pembinaan yang diberikan kepada kader-kader partai. Hal ini bertujuan untuk memotivasi kader-kader untuk terus meningkatkan kinerja mereka dan berkontribusi secara maksimal dalam memajukan agenda-agenda keagamaan partai.

Dengan demikian, evaluasi kinerja merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen SDM PKB Purbalingga dalam bidang keagamaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kader-kader memiliki kinerja yang optimal dan sesuai dengan visi dan misi partai dalam memajukan kegiatan keagamaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

C. Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Keagamaan Di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga

Partisipasi Perempuan dalam Bidang Keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga menjadi penting mengingat peran strategis perempuan dalam pembangunan sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, Badan Otonom Perempuan Bangsa di PKB Purbalingga memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan serta pemberdayaan perempuan.



Gambar 1. Perempuan Bangsa

Pertama, Badan Otonom Perempuan Bangsa di PKB Purbalingga dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan keagamaan. Melalui pelatihan, pembinaan, dan forum diskusi yang diselenggarakan oleh badan tersebut, perempuan dapat meningkatkan pemahaman agama serta keterampilan dalam berbagai bidang keagamaan, seperti pengajaran agama, pembinaan keluarga, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Kedua, keberadaan Badan Otonom Perempuan Bangsa di PKB Purbalingga dapat memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang keagamaan. Dengan adanya wadah tersebut, perempuan memiliki akses yang lebih baik untuk menyuarakan pendapat, mengajukan ide-ide baru, serta terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di tingkat lokal maupun nasional.

Ketiga, Badan Otonom Perempuan Bangsa di PKB Purbalingga dapat menjadi jembatan antara perempuan dengan lembaga keagamaan dan masyarakat. Melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan berbagai pihak terkait lainnya, badan tersebut dapat memperluas jaringan dan meningkatkan sinergi dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang keagamaan. Selain itu, badan tersebut juga dapat menjadi perwakilan perempuan PKB Purbalingga dalam berbagai forum dan kegiatan keagamaan yang diadakan di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengoptimalkan manajemen sumber daya perempuan dalam bidang

keagamaan di PKB Purbalingga. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan-kegiatan Badan Otonom Perempuan Bangsa. Diperlukan upaya untuk mengedukasi dan memberdayakan perempuan agar lebih berperan aktif dan percaya diri dalam kegiatan keagamaan.

Selain itu, perlu pula adanya dukungan dari struktur dan pimpinan PKB Purbalingga dalam mendorong peran serta perempuan dalam kegiatan keagamaan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, alokasi sumber daya yang memadai, serta pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota Badan Otonom Perempuan Bangsa di PKB Purbalingga.

Wawancara dengan Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa (BOPB) PKB Purbalingga, Siti Rofingah, menambah pemahaman tentang peran perempuan dalam kegiatan keagamaan di lingkungan PKB. Menurut Siti Rofingah, BOPB memiliki komitmen kuat untuk mendukung partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan keagamaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dan keterampilan keagamaan perempuan.⁶⁷

Selain itu, Siti Rofingah juga menekankan pentingnya advokasi dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat partai maupun masyarakat. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam struktur kepemimpinan PKB Purbalingga dapat memberikan perspektif yang beragam dan memperkuat legitimasi partai dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, BOPB berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah pada tanggal 17 maret 2024.

⁶⁸ Hasil Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah pada tanggal 17 maret 2024.

Selain itu, Siti Rofingah juga menyoroti pentingnya pembinaan dan pengembangan potensi perempuan dalam bidang keagamaan. Menurutnya, banyak perempuan di PKB Purbalingga memiliki potensi dan minat yang besar dalam berkontribusi dalam kegiatan keagamaan, namun seringkali terkendala oleh kurangnya kesempatan dan dukungan. Oleh karena itu, BOPB berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pelatihan yang berkualitas bagi perempuan agar mereka dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam kegiatan keagamaan.⁶⁹

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Badan Otonom Perempuan Bangsa (BOPB) PKB Purbalingga memiliki peran yang strategis dalam mengelola sumber daya perempuan dalam bidang keagamaan. Melalui berbagai upaya, seperti penyelenggaraan pelatihan, advokasi, dan pembinaan, BOPB berupaya untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam kegiatan keagamaan, sehingga tercipta kesetaraan gender yang lebih baik dan pembangunan keagamaan yang lebih inklusif.

Proses rekrutmen kader perempuan Bangsa di PKB Purbalingga dilakukan dengan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendukung potensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang keagamaan. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah melalui sosialisasi dan penggalangan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan partai, seperti pengajian, pelatihan, dan kegiatan sosial.

Selain itu, PKB Purbalingga juga mendorong kaderisasi perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan, workshop, dan pendidikan kepartaian. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan inklusif, di mana perempuan diundang dan didorong untuk aktif mengikuti kegiatan partai serta menunjukkan minat dan komitmen mereka terhadap pengembangan diri dan kontribusi dalam partai, termasuk dalam bidang keagamaan.

⁶⁹ Hasil Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah pada tanggal 17 maret 2024.



Gambar 2. Pelantikan Perempuan Bangsa

Proses ini juga melibatkan pembinaan dan mentoring yang intensif dari senior dan pengurus partai, termasuk Badan Otonom Perempuan Bangsa (BOPB), yang bertugas untuk memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada para kader perempuan. Melalui pendampingan ini, diharapkan kader perempuan dapat tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin yang tangguh dan mampu berperan aktif dalam memajukan agenda keagamaan partai.

Selanjutnya, partai juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan para kader perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dan fasilitas yang memadai serta dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya peningkatan kesadaran dan kesejahteraan keagamaan di masyarakat.

Dengan demikian, proses rekrutmen kader perempuan Bangsa di PKB Purbalingga merupakan bagian integral dari upaya partai untuk memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam bidang keagamaan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi dan partisipasi aktif perempuan dalam memajukan agenda keagamaan serta pembangunan partai secara keseluruhan.

1. Rekrutmen Kader Perempuan Bangsa sebagai bentuk Partisipasi Perempuan

Rekrutmen kader perempuan Bangsa merupakan strategi yang digunakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan keagamaan di tingkat Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks ini, perempuan Bangsa direkrut dari tokoh perempuan di Purbalingga untuk menempati posisi pengurus di tingkat kabupaten. Selain itu, perempuan Bangsa juga memiliki kader di tingkat kecamatan dan desa. Proses rekrutmen ini menunjukkan komitmen PKB dalam memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat.

Rekrutmen kader perempuan Bangsa dari tokoh perempuan di Purbalingga memiliki beberapa implikasi yang perlu dianalisis:

- a. Pemberdayaan Perempuan: Rekrutmen kader perempuan Bangsa dari tokoh perempuan di Purbalingga merupakan bentuk pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempati posisi pengurus di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, PKB membantu meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan keagamaan.
- b. Representasi Perempuan: Dengan memilih tokoh perempuan dari organisasi Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), PKB juga memperkuat representasi perempuan dalam partai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan diwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan di tingkat partai.
- c. Peningkatan Kesetaraan Gender: Proses rekrutmen kader perempuan Bangsa juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender dalam politik dan keagamaan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk

berperan aktif dalam partai dan organisasi keagamaan, PKB membantu meruntuhkan stereotip dan hambatan yang menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik.

- d. Membangun Jaringan dan Sinergi: Rekrutmen kader perempuan Bangsa juga dapat membantu membangun jaringan dan sinergi antara perempuan dari berbagai latar belakang dan organisasi. Ini dapat memperkuat solidaritas perempuan dan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam memajukan agenda kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif.

Dengan demikian, rekrutmen kader perempuan Bangsa merupakan langkah penting dalam upaya PKB untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan keagamaan di Purbalingga. Dengan memberikan kesempatan dan dukungan kepada perempuan untuk berperan aktif, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan representatif bagi semua warga masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya rekrutmen kader perempuan Bangsa dalam partai. Berikut adalah tambahan hasil wawancara dengan Siti Rofingah:

Siti Rofingah menekankan bahwa rekrutmen kader perempuan Bangsa menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik dan keagamaan di Purbalingga. Menurutnya, melalui rekrutmen ini, PKB memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-partai di tingkat lokal.⁷⁰

Selain itu, Siti Rofingah juga menjelaskan bahwa rekrutmen kader perempuan Bangsa tidak hanya sekadar penunjukan atau pemilihan, tetapi juga melibatkan proses pembinaan dan pengembangan

⁷⁰ Hasil Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah pada tanggal 17 maret 2024.

kapasitas. PKB memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kader perempuan untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan, pemahaman agama, dan kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.⁷¹

Menurut Siti Rofingah, rekrutmen kader perempuan Bangsa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh perempuan dari organisasi Fatayat dan Muslimat NU, menjadi penting karena hal ini memperkaya representasi dan perspektif dalam partai. Dengan demikian, PKB dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan serta masyarakat secara umum.⁷²

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen kader perempuan Bangsa merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam politik dan keagamaan di Purbalingga. Melalui proses rekrutmen yang inklusif dan pembinaan yang berkualitas, diharapkan perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan partai dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Partisipasi Perempuan dalam kegiatan keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga

Partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga merupakan aspek penting dalam memperkuat ikatan keagamaan dan sosial dalam partai tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kegiatan keagamaan yang menjadi fokus partisipasi perempuan, antara lain:

a. Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga secara aktif melaksanakan dua kegiatan penting dalam bidang keagamaan, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara Halal Bi

⁷¹ Hasil Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah pada tanggal 17 maret 2024.

⁷² Hasil Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah pada tanggal 17 maret 2024.

Halal. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan sebagai wujud penghormatan dan kecintaan yang mendalam terhadap junjungan umat Islam. Acara ini biasanya diselenggarakan dengan mengadakan pembacaan shalawat, ceramah agama, pembacaan kitab suci, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya untuk mengenang dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, pelaksanaan acara Halal Bi Halal menjadi momen penting bagi anggota partai dan masyarakat setelah Hari Raya Idul Fitri. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan, membangun rekonsiliasi, serta menciptakan kedamaian di antara sesama umat Islam. Dengan mengadakan kedua kegiatan ini, PKB Purbalingga berharap dapat meningkatkan kecintaan dan kebersamaan antara anggota partai dan masyarakat dalam suasana yang penuh keagamaan dan kebersamaan.

Teknis kerja partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan, seperti Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) di PKB Purbalingga, mencakup beberapa langkah yang terorganisir dengan baik. Para perempuan anggota PKB terlibat dalam berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan acara dengan penuh dedikasi. Mereka aktif dalam mengorganisir segala sesuatu, mulai dari menentukan lokasi, menyusun agenda, hingga mengkoordinasikan kegiatan keagamaan yang akan diselenggarakan. Selain itu, perempuan PKB juga terlibat langsung dalam pelaksanaan acara, baik sebagai pembicara, pengisi acara, atau panitia pelaksana.



Gambar 3. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw

Hasil wawancara dengan Ketua Dewan Syuro, Basyir Fadlulloh, mengatakan:⁷³

Pemahaman tentang pentingnya peringatan Maulid Nabi dan acara Halal Bi Halal dalam konteks kehidupan beragama dan sosial masyarakat. Menurut beliau, peringatan Maulid Nabi merupakan momentum untuk memperkokoh rasa kecintaan dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat Islam. Selain itu, acara Halal Bi Halal dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mempererat silaturahmi antaranggota partai dan masyarakat setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, PKB Purbalingga dapat memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat serta memperluas jaringan solidaritas di antara anggota partai dan warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Syuro, Basyir Fadlulloh, dapat disimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi dan acara Halal Bi Halal memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat ikatan keagamaan dan sosial di masyarakat. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum penting untuk memupuk rasa kecintaan dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat Islam. Sementara itu, acara Halal Bi Halal dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mempererat silaturahmi dan rekonsiliasi antara anggota partai dan

⁷³ Hasil wawancara Ketua Dewan Syuro Basyir Fadlulloh pada tanggal 17 maret 2024.

masyarakat setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan ini, PKB Purbalingga dapat memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat serta memperluas jaringan solidaritas di antara anggota partai dan warga. Dengan demikian, peringatan Maulid Nabi dan acara Halal Bi Halal memiliki peran strategis dalam memperkokoh rasa kebersamaan dan kohesi sosial dalam konteks kehidupan beragama dan sosial masyarakat.

Dalam acara Halal Bi Halal, mereka juga turut serta dalam menyambut tamu, mengatur jalannya acara, serta mengkoordinasikan kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan acara keagamaan, perempuan PKB Purbalingga memainkan peran penting dalam memastikan kesuksesan dan keberlangsungan kegiatan tersebut, serta mempererat hubungan kebersamaan dan kecintaan akan ajaran Islam di antara anggota partai dan masyarakat.



Gambar 4. Kegiatan Halal bi Halal

Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Halal Bi Halal merupakan momen penting dalam meningkatkan kecintaan dan kebersamaan antara anggota partai dan masyarakat dalam suasana yang penuh keagamaan. Perempuan dalam PKB

Purbalingga tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi penggerak dan fasilitator dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan shalawat, ceramah agama, dan pembacaan kitab suci.

b. Santunan Anak Yatim

Kegiatan santunan anak yatim menjadi wujud nyata dari kepedulian perempuan dalam partai terhadap kaum yang membutuhkan, seperti anak yatim. Perempuan berperan dalam mengorganisir dan melaksanakan kegiatan ini, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim secara materi dan moral.

Program santunan untuk anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan materi seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, tetapi juga memperhatikan aspek dukungan moral dan emosional.

Dalam pelaksanaannya, PKB Purbalingga mengorganisir program-program bantuan yang meliputi biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, dan akses ke layanan kesehatan bagi anak yatim piatu. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka serta memberikan kesempatan yang lebih baik dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain itu, PKB Purbalingga juga memberikan dukungan moral kepada anak yatim piatu melalui berbagai kegiatan khusus seperti pengajian, pembagian hadiah, atau acara bersama. Melalui kegiatan-kegiatan ini, anak yatim piatu tidak hanya menerima bantuan materi, tetapi juga mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anggota PKB dan masyarakat sekitar. Hal ini

diharapkan dapat membantu membangun rasa percaya diri, kebahagiaan, dan kebersamaan di antara mereka.

Dengan demikian, program santunan anak yatim piatu yang dijalankan oleh PKB Purbalingga tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memperhatikan aspek dukungan moral dan emosional. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dan kesejahteraan anak yatim piatu di masyarakat.

Dalam teknis kerja partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan seperti santunan anak yatim, PKB Purbalingga memiliki prosedur yang terstruktur. Pertama, para kader perempuan mengidentifikasi dan mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan atau daerah sekitar untuk menghadiri acara santunan. Setelah itu, mereka melakukan pendataan terhadap anak-anak yatim yang akan menerima santunan. Proses pendataan ini melibatkan kader perempuan dalam mencatat informasi penting mengenai setiap anak yatim, seperti nama, usia, latar belakang, dan kebutuhan mereka.

Kriteria pemilihan anak yatim yang diundang biasanya mencakup beberapa faktor, antara lain:

1) Kondisi kebutuhan

Anak-anak yang diundang adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra, baik secara ekonomi maupun sosial.

2) Keterbatasan dukungan keluarga

Anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang mampu memberikan perhatian dan dukungan yang cukup menjadi prioritas untuk mendapatkan santunan.

3) Keterlibatan di lingkungan

Anak-anak yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial atau keagamaan di lingkungan sekitar juga dapat menjadi pertimbangan.

Selain itu, kader perempuan juga memastikan bahwa acara santunan anak yatim diselenggarakan dengan baik, mulai dari persiapan tempat dan peralatan hingga pengaturan agenda acara yang sesuai. Dengan melibatkan perempuan dalam setiap tahapan, PKB Purbalingga memastikan bahwa kegiatan santunan anak yatim dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil wawancara dengan Puput Adi Purnomo, selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga, menegaskan bahwa:⁷⁴

Program santunan untuk anak yatim piatu menjadi salah satu fokus utama dalam upaya partai untuk menjalankan misi sosialnya. Puput Adi Purnomo menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam pelaksanaan program tersebut. Bantuan materi seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya merupakan hal yang penting, tetapi tidak cukup. Lebih dari itu, beliau menjelaskan bahwa dukungan moral dan emosional juga menjadi faktor penting dalam membangun kesejahteraan anak yatim piatu. Melalui kegiatan-kegiatan khusus seperti pengajian, pembagian hadiah, atau acara bersama, PKB Purbalingga berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim piatu. Beliau menekankan bahwa interaksi antara anggota partai dan anak yatim piatu bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membangun ikatan emosional dan kebersamaan yang mendalam. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa anak yatim piatu merasa didukung, dihargai, dan diakui sebagai bagian integral dari komunitas.

Dengan demikian, melalui hasil wawancara dengan Puput Adi Purnomo, dapat dipahami bahwa program santunan untuk anak yatim piatu yang dijalankan oleh PKB Purbalingga tidak hanya

⁷⁴ Hasil wawancara Puput Adi Purnomo, selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga pada tanggal 17 maret 2024.

berfokus pada aspek materi, tetapi juga memperhatikan aspek dukungan moral dan emosional. Pendekatan holistik ini menjadi landasan dalam upaya partai untuk memberikan kontribusi positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak yatim piatu di masyarakat.

c. Bakti Sosial

Partisipasi perempuan dalam kegiatan bakti sosial meliputi berbagai aktivitas yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti penggalangan dana untuk korban bencana, pembagian sembako, atau pelayanan kesehatan gratis. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak dan koordinator kegiatan bakti sosial.

Bakti Sosial yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga mencakup dua kegiatan utama yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Pertama, PKB Purbalingga menyelenggarakan penyaluran bantuan sembako kepada warga kurang mampu sebagai upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka. Melalui program ini, paket sembako yang berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan produk-produk lainnya disalurkan secara berkala kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta memberikan bantuan yang nyata dalam mengatasi masalah ekonomi di tingkat rumah tangga.

Kedua, PKB Purbalingga juga memberikan bantuan berupa ambulans dan motor kepada klinik atau rumah sakit dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menyediakan sarana transportasi kesehatan ini, PKB berupaya untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Ambulans dan motor tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses evakuasi dan penanganan medis bagi pasien yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui kedua kegiatan bakti sosial ini, PKB Purbalingga menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, PKB berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi yang kurang mampu.

Hasil wawancara dengan Siti Mutmainah, selaku Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga, memberikan sudut pandang yang lebih dalam mengenai pelaksanaan program bakti sosial yang dilakukan oleh partai. Menurut beliau bahwa:⁷⁵

Penyaluran bantuan sembako kepada warga kurang mampu merupakan upaya konkret dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di masyarakat. Sebagai bendahara, tugasnya tidak hanya terbatas pada administrasi keuangan, tetapi juga melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pentingnya bantuan berupa ambulans dan motor kepada klinik atau rumah sakit dalam mendukung akses pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, sarana transportasi kesehatan ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Melalui bantuan ini, diharapkan bahwa PKB Purbalingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

⁷⁵ Hasil wawancara Siti Mutmainah, selaku Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga pada tanggal 17 maret 2024.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Siti Mutmainah menguatkan pemahaman bahwa program bakti sosial yang dilakukan oleh PKB Purbalingga bukan hanya sekedar simbolik, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari komitmen partai dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui peran aktif bendahara dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta dukungan penuh dari anggota partai lainnya, diharapkan bahwa program-program bakti sosial ini dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Masura (Majelis Ulama Rakyat)

Perempuan dalam PKB Purbalingga juga terlibat dalam kegiatan Masura, yang merupakan forum untuk mendiskusikan berbagai isu keagamaan dan sosial. Melalui partisipasi dalam Masura, perempuan dapat menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka terkait dengan isu-isu yang relevan dengan masyarakat.

Masura (Majelis Ulama Rakyat) merupakan sebuah wadah partisipasi yang dibentuk untuk melibatkan ulama-ulama dan tokoh agama dalam berbagai kegiatan politik dan sosial.

Pertama-tama, pembentukan dan pengorganisasian Masura bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi bagi ulama dan tokoh agama dalam proses pengambilan keputusan politik serta pemberdayaan sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, Masura menjadi platform yang penting untuk mengintegrasikan perspektif keagamaan dan moral dalam pembangunan masyarakat.

Kedua, Masura menyelenggarakan pertemuan rutin atau diskusi dengan ulama-ulama lokal untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan, sosial, dan politik yang relevan. Melalui forum ini, ulama dan tokoh agama dapat memberikan pandangan serta arahan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi, baik dalam ranah keagamaan maupun sosial.

Terakhir, Masura memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggotanya dalam berbagai aspek, seperti keagamaan, kepemimpinan, dan keterampilan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta kontribusi ulama dan tokoh agama dalam memajukan masyarakat. Dengan adanya pembinaan dan pelatihan ini, diharapkan anggota Masura dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan, memperkuat tatanan sosial, serta menghadirkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, Masura menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antara kegiatan politik, keagamaan, dan sosial. Melalui partisipasi ulama dan tokoh agama dalam Masura, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang harmonis antara aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.





Gambar 3. Kegiatan Masura

Hasil wawancara dengan Basyir Fadlulloh, Ketua Dewan Syuro PKB Purbalingga, memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran dan fungsi Masura (Majelis Ulama Rakyat) dalam konteks lokal. Menurut Basyir Fadlulloh mengatakan:⁷⁶

Masura merupakan sebuah forum yang memungkinkan ulama-ulama dan tokoh agama lokal untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik serta kegiatan sosial yang berkaitan dengan keagamaan. Masura menjadi sarana penting bagi pemberdayaan ulama-ulama lokal dalam memengaruhi arah kebijakan politik yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Melalui diskusi dan pertemuan rutin di Masura, ulama-ulama lokal dapat memberikan pandangan yang mendalam serta saran yang berharga kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keagamaan dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Pentingnya Masura sebagai lembaga pembinaan dan pelatihan bagi ulama-ulama lokal. Melalui program-program pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Masura, ulama-ulama dapat diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat peran ulama sebagai pembawa pesan moral dan spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, melalui hasil wawancara dengan Basyir Fadlulloh, dapat dipahami bahwa Masura tidak hanya menjadi wadah partisipasi politik ulama-ulama lokal, tetapi juga merupakan

⁷⁶ Hasil wawancara Ketua Dewan Syuro Basyir Fadlulloh pada tanggal 17 maret 2024.

lembaga pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi ulama dalam membangun masyarakat yang lebih baik secara spiritual, moral, dan sosial.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan di PKB Purbalingga memiliki dampak positif dalam memperkuat ikatan keagamaan dan sosial dalam partai serta masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkuat identitas keagamaan partai, tetapi juga membantu membangun solidaritas dan kebersamaan antaranggota partai dan masyarakat.

Untuk melaksanakan partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan tersebut, PKB Purbalingga dapat mengadopsi pendekatan inklusif yang melibatkan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan pelatihan dan pembinaan bagi perempuan, pendekatan kolaboratif dalam merencanakan kegiatan keagamaan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi perempuan dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka dalam kegiatan keagamaan di partai.

D. Peran Perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemberdayaan Keagamaan

Peran perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemberdayaan keagamaan menjadi sebuah aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi perempuan dalam ranah politik dan keagamaan, PKB telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memberdayakan perempuan dalam bidang keagamaan:

1. Pembentukan Badan Otonom Perempuan Bangsa (BOPB): PKB Purbalingga telah membentuk Badan Otonom Perempuan Bangsa sebagai wadah khusus bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan partai, termasuk dalam ranah keagamaan. Melalui BOPB,

perempuan memiliki platform untuk mengembangkan potensi diri, berbagi pengalaman, dan menyuarakan aspirasi serta kebutuhan perempuan dalam berbagai konteks, termasuk keagamaan.

2. Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan: Perempuan dalam PKB Purbalingga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, pelatihan keagamaan, dan kegiatan sosial yang berbasis agama. Mereka tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi fasilitator, penggerak, dan pemimpin dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
3. Pengembangan Kapasitas: PKB Purbalingga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan kapasitas perempuan dalam bidang keagamaan melalui pelatihan, workshop, dan program pembinaan yang diselenggarakan secara berkala. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman perempuan terhadap nilai-nilai keagamaan serta peran mereka dalam memajukan agenda keagamaan partai.
4. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Keagamaan: Selain terlibat dalam aktivitas keagamaan, perempuan dalam PKB Purbalingga juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis keagamaan, seperti usaha mikro dan kecil yang berkaitan dengan produksi atau perdagangan produk-produk halal. Ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan ekonomi.
5. Mendorong Kepemimpinan Perempuan: PKB Purbalingga secara aktif mendorong kader perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan baik di tingkat partai maupun di tingkat masyarakat. Ini dilakukan melalui pembinaan, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan dan pengakuan terhadap kontribusi dan kinerja perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang keagamaan.

Dengan demikian, peran perempuan di PKB Purbalingga dalam pemberdayaan keagamaan tidak hanya sebatas sebagai peserta, tetapi juga

sebagai pemimpin, penggerak, dan fasilitator dalam memajukan agenda keagamaan partai serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

E. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Sumber Daya Perempuan di PKB Purbalingga

1. Faktor Pendukung

- a. **Komitmen Organisasi:** Komitmen kuat dari pimpinan dan struktur organisasi PKB Purbalingga dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi faktor pendukung utama. Dukungan ini tercermin dalam alokasi sumber daya, kebijakan inklusif, dan program-program khusus yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan.
- b. **Partisipasi Aktif Perempuan:** Tingginya tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan partai dan keagamaan menjadi faktor penting yang mendukung manajemen sumber daya perempuan. Semakin banyaknya perempuan yang terlibat aktif akan memberikan kontribusi positif dalam menguatkan peran dan representasi perempuan di berbagai level.
- c. **Pemberdayaan Ekonomi:** Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan berbasis keagamaan dapat meningkatkan kemandirian perempuan secara finansial dan memberikan mereka lebih banyak akses dan kontrol terhadap sumber daya.

2. Faktor Penghambat

- a. **Stereotip Gender:** Adanya stereotip gender dan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat dapat menjadi penghambat utama bagi pemberdayaan perempuan. Stereotip ini mungkin membatasi akses perempuan ke posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
- b. **Keterbatasan Akses dan Sumber Daya:** Perempuan mungkin menghadapi keterbatasan akses dan sumber daya, termasuk

pendidikan, pelatihan, dan jaringan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk terlibat aktif dan berkontribusi secara maksimal dalam kegiatan partai dan keagamaan.

- c. Tanggapan Negatif: Respon negatif dari sebagian pihak terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dan keagamaan juga dapat menjadi penghambat. Perempuan mungkin mengalami diskriminasi, intimidasi, atau bahkan kekerasan sebagai akibat dari partisipasi mereka.

Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut, PKB Purbalingga dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang keagamaan. Langkah-langkah seperti penghapusan stereotip gender, peningkatan akses dan sumber daya, serta advokasi untuk perubahan budaya organisasi yang inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan di PKB Purbalingga.

F. Upaya Mengatasi Hambatan dan Tantangan

Upaya mengatasi hambatan dan tantangan dalam manajemen sumber daya perempuan di PKB Purbalingga merupakan langkah krusial untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam bidang keagamaan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Melakukan program-program penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye kesetaraan gender.
2. Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan, manajemen, dan keagamaan. Hal ini akan

membantu meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat dalam kegiatan partai dan keagamaan.

3. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Program: Memastikan bahwa kebijakan dan program-partai PKB Purbalingga mengintegrasikan perspektif gender dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi perempuan. Ini termasuk alokasi sumber daya yang adil dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam struktur partai.
4. Penguatan Jaringan dan Dukungan: Membangun jaringan yang kuat antara perempuan dalam partai dan keagamaan untuk saling mendukung dan bertukar pengalaman. Dukungan dari rekan-rekan sesama perempuan dan pemimpin partai serta tokoh agama dapat membantu mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.
5. Advokasi dan Pemberdayaan: Melakukan advokasi untuk mengubah norma-norma budaya dan struktural yang menghambat partisipasi perempuan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesetaraan gender, advokasi kebijakan, dan pendekatan lainnya untuk memperkuat peran dan suara perempuan dalam organisasi dan masyarakat.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara efektif, PKB Purbalingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan dalam partai dan kegiatan keagamaan. Hal ini akan membantu meningkatkan representasi perempuan, memperluas ruang partisipasi mereka, dan mempromosikan kesetaraan gender secara lebih luas di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas rumusan masalah mengenai partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat ikatan keagamaan dan sosial dalam partai tersebut. Berbagai kegiatan keagamaan seperti Perayaan Hari Besar Islam, santunan anak yatim, bakti sosial, dan kegiatan Masura (Majelis Ulama Rakyat) menjadi wadah bagi perempuan untuk aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif. Partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan di PKB Purbalingga tidak hanya mencakup peran sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak, fasilitator, dan pengambil keputusan. Dalam pelaksanaannya, perempuan turut aktif dalam mengorganisir, menyelenggarakan, dan menggerakkan berbagai kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk mempererat ikatan keagamaan dan sosial dalam partai serta masyarakat. Melalui partisipasi perempuan dalam kegiatan keagamaan, terbentuklah lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kecintaan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan serta memperkuat identitas keagamaan partai. Selain itu, partisipasi perempuan juga memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan solidaritas dan kebersamaan antaranggota partai dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan di PKB Purbalingga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesetaraan gender, memperkuat identitas keagamaan, dan memajukan agenda keagamaan serta sosial dalam partai tersebut.

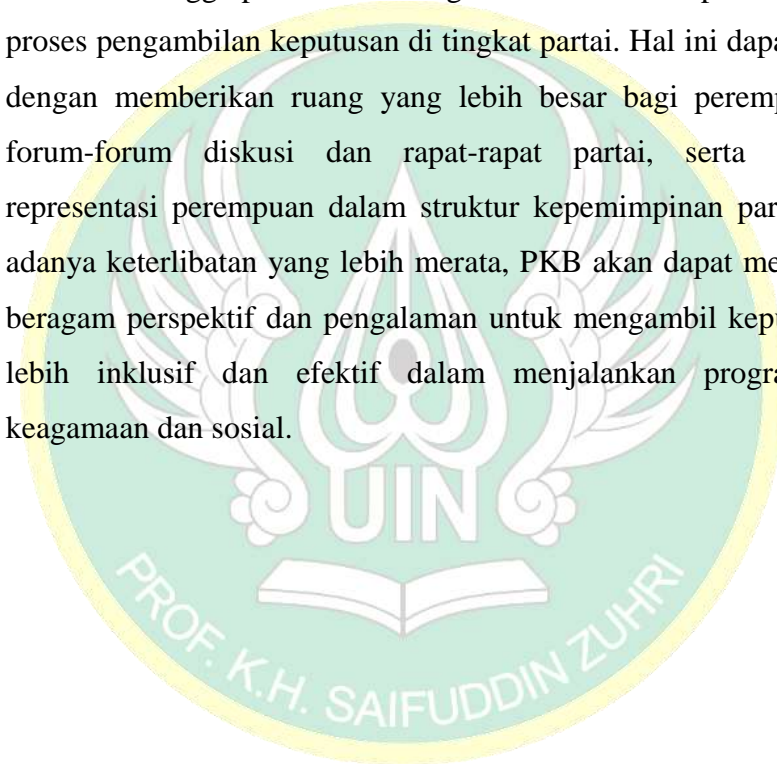
B. Saran

Berikut adalah saran penelitian yang dapat dijalankan berdasarkan analisis di atas:

1. Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Khusus: PKB Purbalingga dapat menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan khusus yang bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan perempuan dalam bidang keagamaan dan manajemen organisasi. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kepemimpinan, retorika publik, manajemen acara keagamaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya pelatihan yang terarah dan mendalam, perempuan dalam PKB akan lebih siap dan percaya diri dalam mengemban tugas-tugas keagamaan dan politik.

2. Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: PKB Purbalingga perlu mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat partai. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam forum-forum diskusi dan rapat-rapat partai, serta memastikan representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan partai. Dengan adanya keterlibatan yang lebih merata, PKB akan dapat memanfaatkan beragam perspektif dan pengalaman untuk mengambil keputusan yang lebih inklusif dan efektif dalam menjalankan program-program keagamaan dan sosial.



Daftar Pustaka

- Afandi, Pandi. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Ahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Raket Press.
- Awaluddin. 2018 “Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”, *Jurnal Publication*, Vol. 2, No. 1.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, dimuat dalam *jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1.
- Choliq, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Creswell, Jhon W. 2009. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Penelitian Presentasi dan Publikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- E. Mulyasa, 1998. *Manajemen Madrasah Aliyah*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Islam.
- Erdiyanti. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Kendari: Shadra.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: CV Aswaja Presindo.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Hanny Fitriyah, dkk. 2012. *Manajemen dan Silabus Majelis Taklim*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- Hasanuddin. 2005. *Manajemn Dakwah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasil observasi dari Arsip DPC PKB Purbalingga pada tanggal 17 Maret 2024
- Hasil wawancara Ketua Dewan Syuro Basyir Fadlulloh pada tanggal 17 maret 2024.
- Hasil wawancara Puput Adi Purnomo, selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga pada tanggal 17 maret 2024.
- Hasil wawancara Siti Mutmainah, selaku Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Purbalingga pada tanggal 17 maret 2024.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Jasmine, Attika Savira. 2023, “Manajemen Sumber Daya Manusia Di Kepengurusan Komunitas Urup Project Purwokerto” *Skripsi*, Program Studi

Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen Dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Puwokerto.

- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kiftiyah, Anifatul. 2019. "Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2.
- Madani, Zaidan Achmad. 2023. "Manajemen Sumber Daya Manusia Di Komunitas Rumah Lengger Banyumas" *skripsi*, Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Manajemen Dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Puwokerto.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muharto dan Arisandy Ambarita. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Nursyifa, Alfi dkk, 2023. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik" *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 1.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ridhotullah, Subeki. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Rizki Priandi Dan Kholis Roisah. 2019. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1.
- Rokim, Syaeful. "Manajemen Pendidikan Keagamaan "Majelis Ta'lim Azzikra" *Islamic Management*, Vol. 01 No. 02, 2018.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Manajemen Public Relation Dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Winda. 2012. "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan" *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siregar, H. Imran dan Moh. Shofiuddin. 2003. *Pendidikan Agama Luar Sekolah Studi Tentang Majelis Taklim*. (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

- Siswanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Wabdabun, Sudar. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yosep, Iyus 2010. *Keperawatan Jiwa*. Bandung : Refika Aditama.
- Zainarti. 2014. “Manajemen Islami Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Iqra’*. Vol. 08 No. 01.





PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

SURAT KETERANGAN
Nomor: 95/A-1/DPC-PKB/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : K.H. Basyir Fadlulloh, M.Pd.
Jabatan : Ketua DPC PKB Purbalingga

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Erli Liana Ramadani
NIM : 1717103012

Telah melakukan observasi dan wawancara di DPC PKB Purbalingga dalam rangka penelitian skripsinya dengan judul "Manajemen Sumber Daya Perempuan dalam Bidang Keagamaan di Partai Kebangkitan Bangsa Purbalingga".

Daftar Nama yang Diwawancarai:

1. K.H. Basyir Fadlulloh, M.Pd.
2. Puput Adi Purnomo
3. Siti Mutmainah
4. Siti Rofingah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wallohul Muwafiq Ila Aqwamithorriiq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PURBALINGGA**


KH. Basyir Fadlullah, M. Pd
Ketua Dewan Syuro &
Plt. Ketua Tanfidz




Puput Adi Purnomo
Sekretaris Tanfidz

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PURBALINGGA

Jl. Letnan Sudani No.15, Kelurahan Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, Jawa Tengah 53319
Email : purbalinggadpcpkb99@gmail.com

Hasil wawancara Ketua Dewan Syuro DPC PKB Purbalingga

Basyir Fadlulloh

1. Bagaimana pentingnya peringatan Maulid Nabi dan acara Halal Bi Halal dalam konteks kehidupan beragama dan sosial masyarakat menurut pandangan Anda?

Jawaban:

Menurut pandangan saya, peringatan Maulid Nabi merupakan momentum penting untuk memperkuat rasa kecintaan dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat Islam. Sementara itu, acara Halal Bi Halal dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mempererat silaturahmi antar anggota partai dan masyarakat setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, PKB Purbalingga dapat memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat serta memperluas jaringan solidaritas di antara anggota partai dan warga.

2. Apa peran dan fungsi Masura (Majelis Ulama Rakyat) menurut pemahaman Anda?

Jawaban:

Menurut saya, Masura menjadi forum yang memungkinkan ulama-ulama lokal dan tokoh agama turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan keagamaan. Melalui Masura, ulama-ulama lokal dapat memberikan pandangan mendalam serta saran berharga kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keagamaan dan sosial di masyarakat.

3. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi kader dalam konteks keagamaan di PKB Purbalingga?

Jawaban:

PKB Purbalingga memperhatikan dengan seksama latar belakang dan rekam jejak calon kader dalam hal keagamaan. Mereka mencari individu yang memiliki kompetensi keagamaan yang kuat, seperti pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, keterampilan dalam memberikan ceramah keagamaan, dan kemampuan untuk memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa partai memperhatikan integritas dan karakter kader dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan.

4. Mengapa pengembangan kader dalam bidang keagamaan dianggap penting oleh PKB Purbalingga?

Jawaban:

PKB Purbalingga menganggap pengembangan kader dalam bidang keagamaan penting karena hal ini membantu meningkatkan kompetensi dan kualitas kader dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan serta mendukung program-program keagamaan yang dilaksanakan oleh partai. Dengan adanya pengembangan kader ini, partai dapat lebih efektif dalam berperan dalam memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat.

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran dan kontribusi perempuan dalam bidang keagamaan di PKB Purbalingga?

Menurut saya, peran dan kontribusi perempuan dalam bidang keagamaan di PKB Purbalingga sangat penting dan bernilai. Perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan keagamaan dapat membantu memperluas jangkauan pesan-pesan keagamaan serta memberikan perspektif yang beragam dalam menangani berbagai isu sosial dan keagamaan.

6. Bagaimana PKB Purbalingga mengatasi hambatan dan tantangan dalam manajemen sumber daya perempuan di bidang keagamaan?

Jawaban:

PKB Purbalingga mengatasi hambatan dan tantangan dalam manajemen sumber daya perempuan di bidang keagamaan dengan mengadakan program-program pelatihan dan pembinaan khusus untuk perempuan. Selain itu, partai juga memberikan dukungan moril dan materiil kepada perempuan yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Dengan cara ini, PKB Purbalingga berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam memperkuat aspek keagamaan dalam masyarakat.

Hasil Wawancara Dengan Puput Adi Purnomo, Sekretaris DPC PKB Purbalingga

1. Bagaimana PKB Purbalingga memastikan bahwa program santunan untuk anak yatim piatu tidak hanya berfokus pada bantuan materi, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek dukungan moral dan emosional?

Jawaban:

PKB Purbalingga memastikan pendekatan holistik dengan melibatkan kegiatan khusus seperti pengajian, pembagian hadiah, dan acara bersama, yang bertujuan membangun ikatan emosional dan kebersamaan antara anggota partai dan anak yatim piatu.

2. Bagaimana interaksi antara anggota partai dan anak yatim piatu dijalankan dalam program santunan yang diselenggarakan oleh PKB Purbalingga?

Jawaban:

Interaksi tersebut tidak hanya bersifat memberikan bantuan, tetapi juga membangun ikatan emosional dan kebersamaan yang mendalam. Melalui kegiatan khusus seperti pengajian dan acara bersama, anggota partai berusaha memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan moral kepada anak yatim piatu.

3. Bagaimana PKB Purbalingga mengevaluasi kinerja kader dalam menjalankan program-program keagamaan?

Jawaban:

Evaluasi dilakukan secara objektif dan terstruktur melalui pertemuan evaluasi berkala. Selama pertemuan tersebut, kader diberikan kesempatan untuk menyampaikan pencapaian, kendala, serta saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

4. Apa saja yang menjadi fokus evaluasi kinerja kader dalam program-program keagamaan PKB Purbalingga?

Jawaban:

Selain pencapaian teknis, evaluasi juga menilai komitmen dan integritas kader dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan sesuai dengan nilai-nilai partai.

5. Bagaimana partisipasi kader dalam kegiatan keagamaan dapat memberikan kontribusi positif bagi PKB Purbalingga?

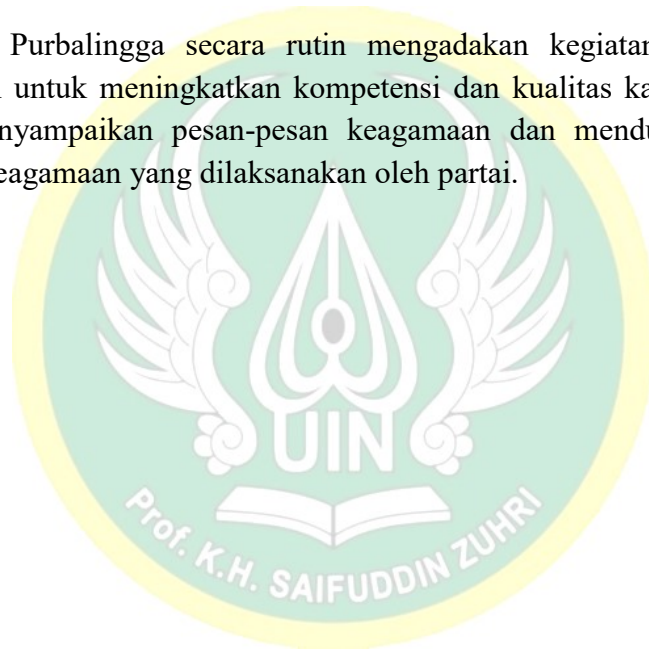
Jawaban:

Partisipasi kader dalam kegiatan keagamaan memperkuat identitas keagamaan partai dalam masyarakat, memperluas jaringan solidaritas antara anggota partai dan warga, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kohesi sosial.

6. Apakah PKB Purbalingga memiliki strategi khusus dalam pengembangan kader dalam bidang keagamaan?

Jawaban:

Ya, PKB Purbalingga secara rutin mengadakan kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kader-kader partai dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan mendukung program-program keagamaan yang dilaksanakan oleh partai.



Hasil wawancara dengan Siti Mutmainah, selaku Bendahara DPC PKB Purbalingga

1. Bagaimana PKB Purbalingga mengidentifikasi dan memilih penerima bantuan sembako dalam program bakti sosial mereka?

Jawaban:

Proses identifikasi penerima bantuan sembako dilakukan melalui survei dan pemetaan secara langsung di tingkat komunitas untuk menentukan keluarga yang membutuhkan bantuan tersebut.

2. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam pemilihan penerima bantuan sembako oleh PKB Purbalingga?

Jawaban:

Ya, kriteria tersebut meliputi tingkat kebutuhan ekonomi, kondisi sosial, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program bakti sosial diatur oleh PKB Purbalingga?

Jawaban:

Proses perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui diskusi internal di partai, kemudian disusunlah program-program bakti sosial yang sesuai dengan prioritas dan kapasitas partai. Pelaksanaan program dilakukan dengan melibatkan anggota partai yang terorganisir secara terstruktur.

4. Apa yang menjadi alasan utama PKB Purbalingga dalam memberikan bantuan berupa ambulans dan motor kepada klinik atau rumah sakit?

Jawaban:

PKB Purbalingga menyadari pentingnya akses yang merata terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga memberikan bantuan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan sarana transportasi kesehatan di daerah.

5. Bagaimana PKB Purbalingga mengukur dampak dari program bakti sosial yang mereka jalankan?

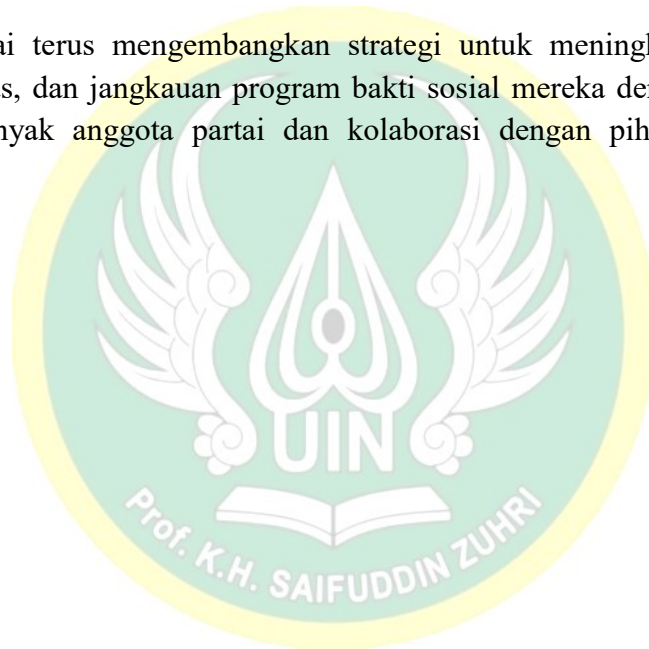
Jawaban:

Dampak program diukur melalui evaluasi berkala yang melibatkan survei dan umpan balik dari masyarakat penerima manfaat, serta pemantauan langsung terhadap implementasi program oleh tim terkait.

6. Apakah PKB Purbalingga memiliki rencana atau strategi khusus untuk memperluas dan meningkatkan dampak dari program bakti sosial di masa mendatang?

Jawaban:

Ya, partai terus mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan jangkauan program bakti sosial mereka dengan melibatkan lebih banyak anggota partai dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.



Wawancara dengan Ketua Badan Otonom Perempuan Bangsa PKB Purbalingga, Siti Rofingah

1. Bagaimana Badan Otonom Perempuan Bangsa (BOPB) PKB Purbalingga mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan keagamaan?

Jawaban:

BOPB memiliki komitmen kuat untuk mendukung partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan keagamaan, salah satunya melalui penyelenggaraan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman agama dan keterampilan keagamaan perempuan.

2. Bagaimana BOPB PKB Purbalingga memandang pentingnya advokasi dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat partai maupun masyarakat?

Jawaban:

Menurut Siti Rofingah, kehadiran perempuan dalam struktur kepemimpinan PKB Purbalingga memberikan perspektif yang beragam dan memperkuat legitimasi partai dalam menjalankan kegiatan keagamaan, oleh karena itu BOPB berkomitmen untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

3. Bagaimana BOPB PKB Purbalingga membina dan mengembangkan potensi perempuan dalam bidang keagamaan?

Jawaban:

BOPB memberikan pembinaan dan pelatihan yang berkualitas bagi perempuan agar mereka dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam kegiatan keagamaan.

4. Bagaimana proses rekrutmen kader perempuan Bangsa di PKB Purbalingga dilakukan?

Jawaban:

Proses rekrutmen dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk melalui sosialisasi, penggalangan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan partai, dan pemberian kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan, workshop, dan pendidikan kepartaian.

5. Bagaimana partai memastikan pengembangan dan perkembangan para kader perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan?

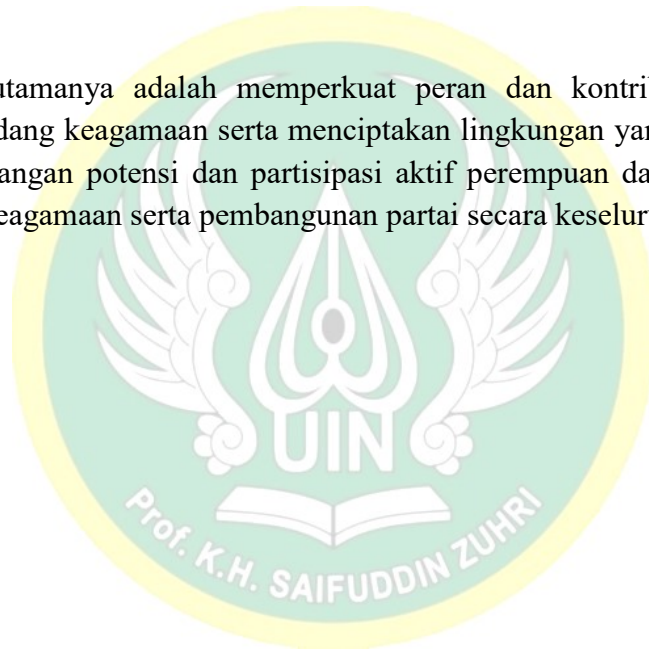
Jawaban:

Partai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan para kader perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dan fasilitas yang memadai serta dapat memberikan kontribusi yang optimal.

6. Apa harapan atau tujuan utama dari proses rekrutmen dan pembinaan kader perempuan Bangsa di PKB Purbalingga?

Jawaban:

Tujuan utamanya adalah memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam bidang keagamaan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi dan partisipasi aktif perempuan dalam memajukan agenda keagamaan serta pembangunan partai secara keseluruhan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

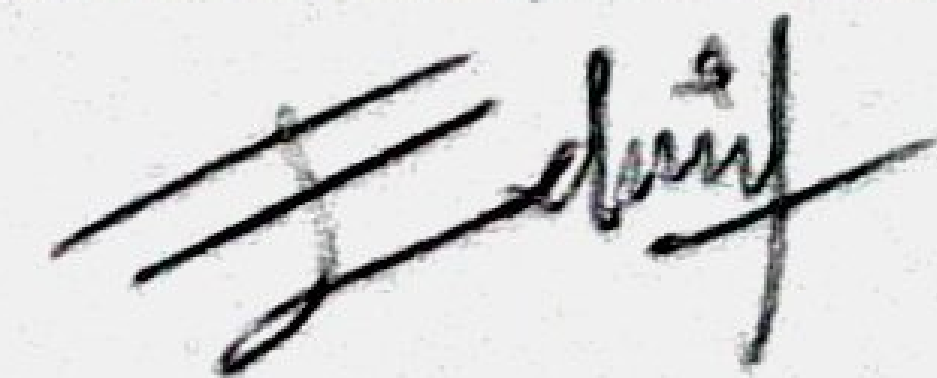
A. Identitas Diri

Nama : Erli Liana Ramadani
NIM : 1717103012
Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Pangkal Bulian RT 01, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi
Nama Ayah : Aenur Rofik
Nama Ibu : Barinah
Nama Saudara Kandung : Eka Agustiani, Erwin Firdiawan, Erika Tri Nur Rosmawati

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 1 Brecek
SMP : SMP Negeri 2 Purbalingga
SMA : SMA Negeri 2 Purbalingga
SI : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 28 Maret 2024



Erli Liana Ramadani